



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN**



PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI



**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023.

Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan menyusun Laporan Kinerja ("LAKIN") sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2023. LAKIN tahun 2023 memuat capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

LAKIN Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sebagai wadah untuk menguraikan pencapaian kinerja sepanjang tahun 2023 yang dilaksanakan berdasarkan Renstra TA 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahunan yang telah disepakati. Mekanisme pengukuran kinerja yang dilaksanakan ialah dengan membandingkan antara kinerja yang diperjanjikan dengan kinerja yang telah dicapai.

Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan ini merupakan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan merupakan umpan balik bagi jajaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk meningkatkan kinerja unit kerja yang akan datang.

Jakarta, Januari 2024

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Jalan dan Jembatan



Reni Ahiantini

NIP. 196910181996032002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (“Direktorat PPIJJ”) merupakan Unit Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) yang mengemban tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut dan guna memenuhi indikator capaian kinerja, Direktorat PPIJJ mempertajam dengan menyusun rencana lima tahunan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Direktorat PPIJJ Tahun Anggaran (TA) 2020–2024.

Berdasarkan Renstra tersebut, target tahunan kemudian diturunkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Direktur PPIJJ tercantum anggaran belanja Direktorat PPIJJ. Pada tahun 2023, Perjanjian Kinerja Direktorat PPIJJ tercantum anggaran belanja dalam satu tahun kerja yaitu sebesar Rp. 32.585.069.000.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud Direktorat PPIJJ dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Pada tahun 2023, total paket kegiatan Direktorat PPIJJ adalah sebanyak 17 paket kegiatan yang terdiri dari 15 paket swakelola dan 2 paket kontraktual. Berdasarkan *e-Monitoring* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, realisasi anggaran yang berhasil dicapai Direktorat PPIJJ per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 32.200.700.000,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 32.585.069.000,-. atau dengan persentase capaian sebesar 98,82%.

Tingkat pencapaian kinerja Direktorat PPIJJ tahun 2023 adalah sebesar 25%, dimana artinya Direktorat PPIJJ berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan yaitu sebesar 25%. Berikut tabel perbandingan antara capaian kinerja terhadap target PK tahun 2023:

Indikator Kinerja Kegiatan / Output		Satuan	Target (PK)	Realisasi
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			25%	25%
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1
2	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	5	5
3	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1
4	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	2	2
5	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NSPK	2	2
6	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	5	5

Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Direktorat PPIJJ dan mempengaruhi dalam melakukan penyiapan proyek KPBU sektor jalan dan jembatan, seperti perubahan ruang lingkup proyek, perubahan rencana perusahaan proyek, serta permasalahan dalam mencapai kesepakatan dengan para pemangku kepentingan untuk finalisasi proyek KPBU.

Pada tahun 2023, Direktorat PPIJJ ditunjuk sebagai *pilot project* pelaksanaan kegiatan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di DJPI. Pada tanggal 29 November 2023, Direktorat PPIJJ resmi tersertifikat SNI ISO 37001:2016 SMAP, sehingga diharapkan Direktorat PPIJJ mampu mengimplementasikan penguatan sistem manajemen organisasi guna mencegah praktik korupsi, menghindari risiko permasalahan hukum, ataupun mengontrol konflik kepentingan dalam upaya pencapaian kinerja pelaksanaan penyiapan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Isu Strategis	3
1.5 Sistematika Laporan	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 Rencana Strategis	5
2.1.1 Visi	5
2.1.2 Misi	6
2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi	6
2.1.4 Program dan Kegiatan Pembangunan	8
2.2 Perjanjian Kinerja	9
2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal	10
2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir	10
2.2.3 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja	10
2.3 Metode Pengukuran	12
2.4 Target Tahun 2023	16
2.4.1 Target Output Kinerja	16
2.4.2 Kerangka Pendanaan	16
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	18
3.1 Sumber Daya Manusia	18

3.1.1 Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan	18
3.1.2 Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Usia	19
3.2 Sarana Prasarana	20
3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	21
3.4 Analisis Sumber Daya Manusia dan Anggaran	23
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	24
4.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	24
4.2 Pelaksanaan dan Hasil Evaluasi SAKIP.....	33
4.3 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	34
4.3.1 Analisis Capaian Kinerja.....	41
4.3.2 Capaian Kinerja Paket Pembiayaan Proyek KPBU Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2023	43
4.3.3 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	44
4.3.4 Analisis Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah	44
4.3.5 Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional (<i>Benchmarking</i>).....	46
4.4 Realisasi Anggaran	50
4.4.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	54
4.5 Penghargaan Atas Kinerja	55
4.6 Inovasi	56
BAB V PENUTUP	59
5.1 Simpulan Umum	59
5.2 Faktor Pendukung Keberhasilan	60
5.3 Permasalahan.....	60
5.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	60
5.4.1 Rekomendasi	60
5.4.2 Tindak Lanjut.....	61
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Awal	10
Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Akhir	10
Tabel II.3 Kronologis Revisi Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat PPIJJ.....	11
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Revisi Pertama.....	11
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Revisi Kedua	12
Tabel II.6 Manual Indikator Kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2023.....	13
Tabel II.7 <i>Cascading</i> Kinerja Direktorat PPIJJ	15
Tabel II.8 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2023 Berdasarkan Renstra.....	16
Tabel II.9 Matriks Target Kinerja dan Pendanaan Direktorat PPIJJ Berdasarkan Renstra TA 2020-2024	17
Tabel III.1 Komposisi Pegawai di Lingkungan Direktorat PPIJJ Tahun 2023	18
Tabel III.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	18
Tabel III.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan	18
Tabel III.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	19
Tabel III.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	20
Tabel III.6 Daftar Sarana dan Prasarana Direktorat PPIJJ.....	20
Tabel IV.1 Tabel Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Atas Pelaksanaan SAKIP Tahun 2022 Direktorat PPIJJ.....	25
Tabel IV.2 Komponen dan Bobot Penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2022	33
Tabel IV.3 Komponen dan Bobot Penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2023	33
Tabel IV.4 <i>Cascading</i> Direktorat PPIJJ Tahun 2023.....	35
Tabel IV.5 Pencapaian Kinerja Direktorat PPIJJ Berdasarkan RO	39
Tabel IV.6 Capaian Kinerja Direktorat PPIJJ TA 2023	41
Tabel IV.7 Capaian Paket Pembiayaan Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan TA 2023 ...	43
Tabel IV.8 Perbandingan Kinerja Direktorat PPIJJ dengan Tahun Sebelumnya	44
Tabel IV.9 Realisasi Capaian Kinerja Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan Periode 2020-2023	45
Tabel IV.10 Target Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.....	47
Tabel IV.11 Target Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024.....	47
Tabel IV.12 Capaian Realisasi Anggaran Direktorat PPIJJ pada Bulan Desember 2023	50
Tabel IV.13 Target, Realisasi, dan Kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1	Trans Papua	1
Gambar I-2	Struktur Organisasi Direktorat PPIJJ	3
Gambar II-1	Jembatan Callender Hamilton (Cimalaya)	5
Gambar III-1	Pagu Anggaran Direktorat PPIJJ TA 2023 Berdasarkan Unit Pelaksana	21
Gambar III-2	DIPA Direktorat PPIJJ TA 2023 Berdasarkan Klasifikasi Output	23
Gambar III-3	Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dan Perjanjian Penjaminan Proyek Jalan Tol Akses Patimban	23
Gambar IV-1	Jalan Lintas Timur Sumatera - Riau	24
Gambar IV-2	Kurva S Direktorat PPIJJ TA 2023	53
Gambar IV-3	Penyerahan Sertifikat SNI ISO 37001:2016 SMAP	56
Gambar IV-4	Aplikasi SIPRABU	57
Gambar IV-5	Aplikasi SIPADU	58

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	i
LAMPIRAN II	DIPA REVISI KE-9	ii
LAMPIRAN III	PENGUKURAN KINERJA	iii
LAMPIRAN IV	BERITA ACARA KESEPAKATAN CAPAIAN KINERJA	iv
LAMPIRAN V	PENGHARGAAN	v
LAMPIRAN VI	DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN	vi



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asas akuntabilitas yang mencerminkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Salah satu bentuk Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat PPIJJ atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2018 tentang penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian PUPR. Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ tahun 2023 dibuat dengan menyajikan informasi mengenai pencapaian atas rencana, tindakan dan kegiatan atas perencanaan dan perjanjian kinerja Direktorat PPIJJ dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional melalui program Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ tahun 2023 juga menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja selama Tahun Anggaran 2022. Tujuan penyajian Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri PAN RB



Gambar I-1 Trans Papua

atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat PPIJJ untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

1.2 Tugas dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka kedudukan, tugas, dan fungsi Direktorat PPIJJ adalah sebagai berikut:

A. Kedudukan

Direktorat PPIJJ berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Tugas

Direktorat PPIJJ mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

C. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Direktorat PPIJJ menyelenggarakan fungsi:

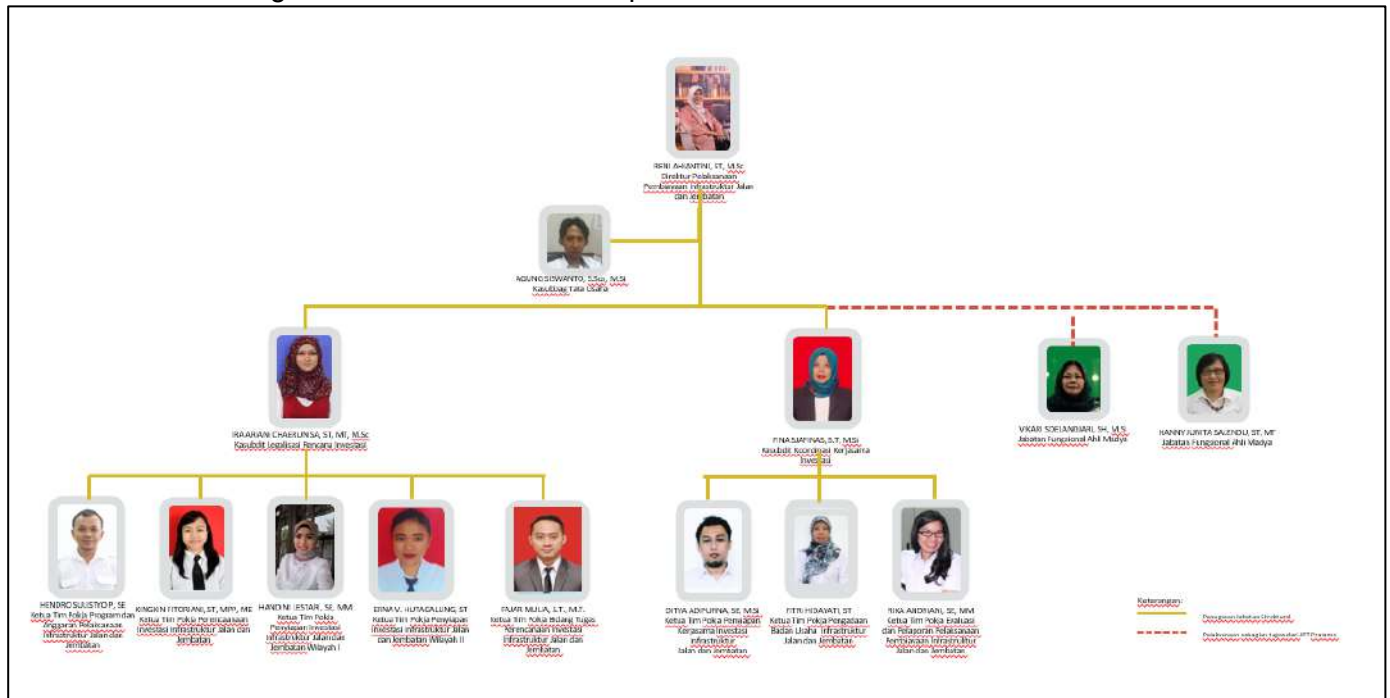
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
3. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
4. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
5. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
6. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

1.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Direktorat PPIJJ didukung oleh struktur organisasi yang terdiri atas:

- A. Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi;
- B. Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi; dan
- C. Subbagian Tata Usaha.

Struktur Organisasi Direktorat PPIJJ diperlihatkan dalam Gambar 1 berikut.



Gambar I-2 Struktur Organisasi Direktorat PPIJJ

1.4 Isu Strategis

Beberapa isu strategis terkait permasalahan yang umumnya dihadapi oleh Direktorat PPIJJ adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi antar *stakeholder* terkait pelaksanaan proyek KPBU belum optimal;
2. Proses pelaksanaan pengadaan proyek KPBU membutuhkan waktu yang cukup lama;
3. Belum efektifnya kelembagaan simpul KPBU dalam mendukung pelaksanaan KPBU;
4. Ketersediaan lahan yang *clear and clean* untuk proyek KPBU;
5. Terbatasnya kapasitas fiskal untuk pembayaran Proyek KPBU dengan skema *Availability Payment*/Ketersediaan Layanan;

6. Dukungan kelayakan proyek dan penjaminan Pemerintah untuk proyek KPBU terbatas untuk mendanai seluruh proyek KPBU;
7. Lamanya proses pemenuhan *financial close* bagi Badan Usaha yang telah memenangkan proses lelang.

1.5 Sistematika Laporan

Setelah pembahasan Bab I “Pendahuluan” yang meliputi penjelasan umum organisasi, aspek strategis, dan isu/permasalahan utama yang sedang dihadapi Direktorat PPIJJ, sistematika selanjutnya dari penyajian Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ adalah sebagai berikut:

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan dalam renstra dan ikhtisar perjanjian kinerja yang disajikan melalui uraian Renstra Direktorat PPIJJ TA 2020-2024, Perjanjian Kinerja Direktorat PPIJJ tahun 2023, dan target 2023 menurut Renstra.

Bab III Kapasitas Organisasi

Pada bab ini diuraikan mengenai pertanggungjawaban seluruh sumber daya yang dimiliki, mencakup SDM, sarana dan prasarana, dan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Pada bab ini juga dijelaskan mengenai potensi dan hambatan yang dihadapi karena faktor sumber daya yang dimiliki.

Bab IV Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran Direktorat PPIJJ 2023, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, perbandingan kinerja, realisasi anggaran, pemanfaatan Laporan Kinerja.

Bab V Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

Lampiran

Lampiran memuat dokumen pendukung Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Tujuan Direktorat PPIJJ merupakan penjabaran salah satu tujuan dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Pembangunan infrastruktur, khususnya sektor jalan dan jembatan merupakan salah satu infrastruktur vital yang akan menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi. Pembangunan



Gambar II-1 Jembatan Callender Hamilton (Cimalaya)

prasarana jalan dan jembatan memiliki fungsi aksesibilitas untuk membuka daerah kurang berkembang dan fungsi mobilitas untuk memacu daerah yang telah berkembang. Kementerian PUPR pada tahun 2015-2019 telah melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan yang meliputi pembangunan jalan sepanjang 2.650 km, jembatan baru sepanjang 29.859 m, dan jalan bebas hambatan

sepanjang 1.298 km. Pada target output utama Renstra Kementerian PUPR tahun

2020-2024, untuk sektor jalan dan jembatan Kementerian PUPR menargetkan dapat terbangun jalan nasional baru sepanjang 3.000 km, jembatan baru sepanjang 60.000 m, dan jalan bebas hambatan sepanjang 2.500 km.

2.1.1 Visi

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

2.1.2 Misi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat PPIJJ sebagaimana Renstra Direktorat PPIJJ TA 2020–2024 dan disusun berdasarkan target *output* Kementerian PUPR di sektor jalan dan jembatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Konektivitas

Peningkatan konektivitas jalan dilaksanakan untuk mengurangi waktu tempuh. Waktu tempuh yang tinggi dapat berdampak pada biaya logistik yang tinggi dan dapat menghambat daya saing Indonesia di dunia global. Diharapkan pada tahun 2024 dapat diwujudkan dominasi jaringan jalan nasional yang memiliki waktu tempuh di bawah 2,0 jam/100 km (dengan kecepatan rata-rata 50 km/jam).

2. Peningkatan Aksesibilitas

Peningkatan aksesibilitas akan didorong untuk mendukung simpul/kawasan wilayah strategis yang sudah terhubung jalan nasional, khususnya yang mendukung pengembangan wilayah melalui pembangunan jalan pada jalan lintas utama pulau, jalan yang mendukung kawasan industri dan pariwisata prioritas, jalan akses ke simpul transportasi prioritas, jalan lingkaran/trans pulau terluar dan jalan akses mendukung wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) dan kawasan perbatasan. Sebagai contoh, penyelesaian jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Provinsi Aceh – Provinsi Lampung menjadi program prioritas untuk menurunkan waktu tempuh. Kemudian adanya Pembangunan Jalan Trans Papua yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antar wilayah, meningkatkan ekonomi di Provinsi Papua serta meningkatkan ketersediaan jaringan jalan, mengingat Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Mamberamo adalah bagian dari jalan non tol di Papua yang merupakan tulang punggung regional Pulau Papua. Selain itu, contoh lainnya adalah Jalan Tol Akses Patimban ini sangat ditunggu dan sangat menentukan keberhasilan Pelabuhan Patimban untuk melayani arus logistik barang yang ada di sebelah timur Jakarta. Tol ini sangat strategis, tidak hanya arus logistiknya saja, tetapi juga untuk mengendalikan traffic di Jakarta ke arah baratnya. Jadi produk-produk di sebelah timur tidak perlu ke barat dulu untuk ekspor dan impornya, tetapi langsung ke timur sehingga memecah beban traffic yang ada di Jakarta.

Sementara itu, pembangunan jalan akses ke simpul prioritas diarahkan untuk menjamin kemanfaatan infrastruktur secara optimal seperti pelabuhan dan bandara, seperti diantaranya dengan menyediakan akses ke pelabuhan utama Kuala Tanjung sehingga dapat mendukung berkembangnya kawasan industri di sepanjang koridor tersebut.

3. Peningkatan Kapasitas Jalan

Peningkatan kapasitas jalan didorong untuk menjadi solusi kemacetan telah menjadi persoalan utama pada jaringan jalan nasional yang menyebabkan rendahnya tingkat kinerja angkutan barang dan orang. Peningkatan kapasitas jalan juga diprioritaskan untuk mengurangi praktik pembebanan berlebih di jalan (*road overloading*) melalui penyelenggaraan jembatan timbang yang terintegrasi dengan penyelenggaraan jalan.

Mengingat kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan konektivitas, aksesibilitas, dan kapasitas jalan yang sangat besar, diperlukan inovasi skema pembiayaan infrastruktur selain APBN, salah satunya adalah seperti KPBU, pemanfaatan dana jangka panjang, dan program dana bergulir (*revolving fund*) khususnya untuk pengembangan jalan tol.

Skema pembiayaan KPBU saat ini terbagi menjadi 2 (dua), salah satunya adalah KPBU berbasis User Charge dimana pengembalian investasi berdasarkan tarif pengguna jalan, dan

KPBU berbasis *Availability Payment* (AP) yang berbasis kinerja. Skema KPBU-AP diharapkan dapat menjadi solusi pembiayaan untuk meningkatkan kualitas jalan melalui keterpaduan penyelenggaraan jalan, salah satunya adalah dengan pengoperasian jembatan timbang untuk mengendalikan perilaku pembebanan berlebih di jalan (*road overloading*) yang menjadi penyebab utama kerusakan jalan.

Strategi kebijakan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

1. Mengingat kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan konektivitas, aksesibilitas, dan kapasitas jalan yang sangat besar, diperlukan inovasi skema pembiayaan infrastruktur selain APBN, salah satunya adalah seperti KPBU, pemanfaatan dana jangka panjang, dan program dana bergulir (*revolving fund*) khususnya untuk pengembangan jalan tol.
2. Skema pembiayaan KPBU saat ini terbagi menjadi 2 (dua), salah satunya adalah KPBU berbasis *User Charge* dimana pengembalian investasi berdasarkan tarif pengguna jalan, dan KPBU berbasis *Availability Payment* (AP) yang berbasis kinerja. Skema KPBU-AP diharapkan dapat menjadi solusi pembiayaan untuk meningkatkan kualitas jalan melalui keterpaduan penyelenggaraan jalan, salah satunya adalah dengan pengoperasian jembatan timbang untuk mengendalikan perilaku pembebanan berlebih di jalan (*road overloading*) yang menjadi penyebab utama kerusakan jalan.
3. Menciptakan Pembiayaan kreatif lain seperti Strategi *Three Bold Actions* yang meliputi *Fast Track* KPBU, Peningkatan Kepastian dalam Investasi (*Investment Certainty*), dan Integrasi Prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) pada Proyek KPBU. Melalui strategi dan langkah-langkah inovatif ini, diharapkan dapat tercapai perbaikan dalam proses bisnis KPBU di Kementerian PUPR, serta peningkatan kualitas Proyek KPBU. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan ketertarikan investor terhadap proyek KPBU.
4. Target proyek yang akan dikerjakan pada tahun 2020-2024, diantaranya: pembangunan direncanakan sepanjang 3000 km jalan baru dan 60.000 m jembatan baru. Selain itu, Kementerian PUPR juga ditargetkan akan menambah jalan bebas hambatan sepanjang 2.500 km di tahun 2020-2024.

2.1.4 Program dan Kegiatan Pembangunan

Untuk mempertajam capaian sasaran (*output*) dalam Rencana Strategis Direktorat PPIJJ, kegiatan pokok pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan adalah kegiatan teknis yang

dilaksanakan unit kerja setingkat eselon III dalam organisasi Direktorat PPIJJ dengan rincian sebagai berikut.

1. Tersedianya dokumen perencanaan kerjasama pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
2. Tersedianya dokumen penyiapan kerjasama pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
3. Tersedianya dokumen penyiapan dukungan kerjasama pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
4. Tersedianya dokumen penyiapan transaksi dan kerjasama pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
5. Tersedianya paket pembiayaan pelaksanaan transaksi dan pendampingan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
6. Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan; dan
7. Tersedianya Laporan Kinerja pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang membuat perjanjian untuk melaksanakan program/kegiatan berdasarkan indikator kinerja tertentu. Di dalam Perjanjian Kinerja terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam satu tahun yang dibekali dengan pagu anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Direktorat PPIJJ menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai komitmen yang merepresentasikan tujuan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Direktorat PPIJJ sebagai salah satu unit kerja yang mendukung pelaksanaan program dan kebijakan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2023 memiliki sasaran program meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya. Wujud kegiatan dari sasaran program tersebut yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja adalah penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan. Berikut Rincian dokumen Perjanjian Kinerja TA 2023 awal dan perubahannya:

2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal

Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Awal

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2022	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25%	25%
Kegiatan	Anggaran	
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rp12.500.000.000	

2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Akhir

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2022	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25%	25%
Kegiatan	Anggaran	
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rp32.585.069.000	

2.2.3 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada

Tahun Anggaran 2023 mengalami revisi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Oktober dan Desember. Perubahan dilakukan dengan merinci lebih detail terkait indikator kinerja yang ditargetkan hingga akhir tahun. Kronologis revisi pagu anggaran Direktorat PPIJJ Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel II.3 Kronologis Revisi Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat PPIJJ

No	Perjanjian Kinerja	Pagu Anggaran	Tanggal Terbit
1	PK Awal	12.500.000.000	Januari 2023
2	PK Revisi	40.899.202.000	Oktober 2023
3	PK Akhir	32.585.069.000	Desember 2023

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Revisi Pertama

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25%
Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Rekomendasi Kebijakan
Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4 Rekomendasi Kebijakan
Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4 Rekomendasi Kebijakan
Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2 Kesepakatan
NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2 NSPK
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen
Layanan Perkantoran	1 Layanan
Kegiatan:	
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rp 40.899.202.000

Revisi pertama Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 dilakukan pada Bulan Oktober 2023. Pada perubahan Perjanjian Kinerja pertama ini mengakibatkan perubahan nilai anggaran Direktorat PPIJJ yang cukup signifikan yaitu naik menjadi sebesar Rp 40.899.202.000,-. Nilai anggaran melonjak naik karena adanya fasilitasi *loan* ADB paket kegiatan *Toll Roads and Bridges FBC and Bidding Documents Development* sebesar Rp 28.899.202.000,-.

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Revisi Kedua

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25%
Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Rekomendasi Kebijakan
Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	5 Rekomendasi Kebijakan
Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Rekomendasi Kebijakan
Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2 Kesepakatan
NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2 NSPK
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen
Layanan Perkantoran	1 Layanan
Kegiatan:	
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rp 32.585.069.000

Revisi kedua Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 dilakukan pada Bulan Desember 2023, adapun revisi ini dilakukan karena adanya *drop loan* paket kegiatan *Toll Roads and Bridges FBC and Bidding Documents Development* dari yang semula dianggarkan sebesar Rp 28.899.202.000,- menjadi sebesar Rp 19.766.525.000,-, kemudian dikarenakan adanya penambahan dua paket kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Pendukung FBC Proyek KPBU Jalan Tol Demak-Tuban dan Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta pada Rincian Output KRO **Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan**, serta Penyusunan Dokumen Rekomendasi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan Tol pada Rincian Output **NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan**.

2.3 Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Dengan membandingkan antara realisasi dan rencana, maka dapat dilihat jumlah persentase pencapaian pada masing-masing indikator kinerja utama. Dengan diketahui capaian

kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Indikator keberhasilan biasanya dikaitkan dengan target-target tertentu yang hendak dicapai. Indikator Kegiatan (*output*) adalah indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dan tercapainya *output* kegiatan tersebut. Penetapan indikator didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang mudah diukur dan mudah dilaksanakan dalam waktu tertentu. Indikator Sasaran Program dan Kegiatan pada Renstra Tahun 2020-2024 Direktorat PPIJJ, serta cara perhitungannya sebagai berikut:

Tabel II.6 Manual Indikator Kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2023

Sasaran	Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Metode Perhitungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SP 01	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	IKSP, merupakan nilai komposit dari indikator 1. Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang siap dikerjasamakan (%)	IKSP2, dihitung penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) berikut: Indikator 1 (30%) Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target. Indikator 2 (35%) Dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah paket pembiayaan kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang masuk Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan dengan target dikali 100%. Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan terdiri dari Studi Pendahuluan/Pra FS, OBC. FBC (FS). Indikator 3 (35%)

Sasaran	Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Metode Perhitungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah paket pembiayaan kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan (minimal tahap prakualifikasi) dengan target dikali 100%.
SK 03	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan: 1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (%)	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan berikut: Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang disusun dibandingkan dengan target Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target.

Metode pengukuran yang dilakukan dalam menghitung capaian kinerja serta *output* kegiatan yang ingin dicapai Direktorat PPIJJ merupakan turunan dari *cascading* kinerja yang diuraikan dalam Renstra DJPI TA 2020–2024. Berdasarkan *cascading* kinerja tersebut, target capaian Sasaran Kegiatan di tahun 2023 saling terintegrasi di antara unit kerja yang ada di DJPI sehingga mengakibatkan adanya *sharing* dalam pencapaian sasaran kegiatannya, dari target sebesar 100% dibagi untuk empat unit kerja yang ada di DJPI yaitu menjadi 25%. *Cascading* kinerja Direktorat PPIJJ berdasarkan Renstra sebagai berikut:

Tabel II.7 Cascading Kinerja Direktorat PPIJJ

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN										
Sasaran Strategis (SS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Indikator	Output Kegiatan	Bobot Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkat-nya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkat-nya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25%	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Jalan dan Jembatan yang disusun dibandingkan dengan target	50%	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	20%
									Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	35%
									Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25%
									NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	20%
						Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Jumlah Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target	50%	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	35%
									Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	35%
									Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	30%

2.4 Target Tahun 2023

2.4.1 Target Output Kinerja

Direktorat PPIJJ dalam memenuhi ketercapaian sasaran program dan kegiatan telah merencanakan output indikator dan menetapkan target per indikator setiap tahunnya sebagai upaya terselenggaranya pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan. Target pencapaian sasaran Direktorat PPIJJ pada tahun 2023 per masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.8 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2023 Berdasarkan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan / Output		Target 2023
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan		25%
<i>Output</i>	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Rekomendasi Kebijakan
	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Rekomendasi Kebijakan
	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3 Rekomendasi Kebijakan
	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2 Rekomendasi Kebijakan
	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	12 Kesepakatan
	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 NSPK
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4 Dokumen
	Layanan Perkantoran	1 Layanan

Sumber: Renstra Direktorat PPIJJ TA 2020-2024

2.4.2 Kerangka Pendanaan

Berdasarkan penetapan anggaran di dalam Renstra Direktorat PPIJJ TA 2020-2024, total kebutuhan pendanaan kegiatan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan oleh Direktorat PPIJJ pada tahun 2023 adalah sebesar Rp32.870.000.000. Berikut matriks target kinerja dan pendanaan Direktorat PPIJJ berdasarkan Renstra TA 2020-2024:

Tabel II.9 Matriks Target Kinerja dan Pendanaan Direktorat PPIJJ Berdasarkan Renstra TA 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN									1.544.237	1.991.581	383.920	382.472	394.183	4.696.394
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN														
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan														
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan									1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Operasionalisasi Kantor Direktorat	Layanan	1	1	1	1	1	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIJJ	Layanan	1	1	1	1	1	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
KEGIATAN 2: Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			%	100	100	100	100	100	50.244	160.000	172.870	180.158	183.372	746.644
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :														
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	%	25	25	25	25	25	25	17.779	113.150	31.921	32.870	33.847	229.567
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan									17.779	113.150	31.921	32.870	33.847	229.567
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	1.790	1.000	1.050	1.070	1.100	6.010
1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	1.790	1.000	1.050	1.070	1.100	6.010
2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	6	1	1	1	1	10	1.789	2.000	2.050	2.100	2.150	10.089
1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	6	1	1	1	1	10	1.789	2.000	2.050	2.100	2.150	10.089
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	4	4	3	3	3	17	4.500	92.250	9.471	9.800	9.647	125.668
1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	1	1	6	2.250	46.125	3.050	3.100	3.120	57.645
2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	3	2	2	2	11	2.250	46.125	6.421	6.700	6.527	68.023
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	10	1.800	4.000	3.600	3.700	3.800	16.900
1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	10	1.800	4.000	3.600	3.700	3.800	16.900
5	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang siap dikerjasamakan	Kesepakatan	4	13	10	12	12	51	3.800	6.600	7.700	7.900	8.600	34.600
1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Dokumen	2	2	2	2	2	10	1.800	3.000	4.100	4.200	4.300	17.400
2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Kesepakatan	4	13	10	12	12	51	2.000	3.600	3.600	3.700	4.300	17.200
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	800	1.050	1.100	1.150	4.100
1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	800	1.050	1.100	1.150	4.100
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	4	4	4	4	4	20	3.800	6.200	6.700	6.900	7.100	30.700
1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	4	4	4	4	4	20	3.800	6.200	6.700	6.900	7.100	30.700
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	1	1	1	1	1	5	300	300	300	300	300	1.500
1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	1	1	1	1	1	5	300	300	300	300	300	1.500

Sumber: Renstra Direktorat PPIJJ TA 2020-2024



BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

3.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat PPIJJ didukung oleh orang 57 pegawai yang terdiri pegawai 30 laki-laki dan 27 perempuan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.1 Komposisi Pegawai di Lingkungan Direktorat PPIJJ Tahun 2023

No	Pegawai	Jumlah
1.	PEGAWAI NEGERI SIPIL	32
2.	PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)	9
3.	PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	6
4.	TENAGA PENDUKUNG INDIVIDUAL	10
Total		57

3.1.1 Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

Komposisi Pegawai di Lingkungan Direktorat PPIJJ Tahun 2023 berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan.

Tabel III.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	Gol I	0
2.	Gol II	0
3.	Gol III	33
4.	Gol IV	8
Total		41

Tabel III.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan

No	Kelompok Jabatan	Jumlah
A	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	32
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	2
3.	Eselon IV	1
4.	JF API Ahli Madya	1
5.	JF AK Ahli Madya	3
6.	JF API Ahli Muda	1
7.	JF AK Ahli Muda	3

No	Kelompok Jabatan	Jumlah
8.	Arsiparis Ahli Muda	1
9.	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	2
10.	JF AK Ahli Pertama	13
11.	Perencana Ahli Pertama	1
12.	JF API Ahli Pertama	1
13.	Analisis Kerja Sama	1
14.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	1
B	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	9
15.	JF AK Ahli Pertama	8
16.	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	1
C	Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil	6
17.	Analisis Pembiayaan	1
18.	Penelaah Kebijakan	1
19.	Penelaah BMN	1
20.	Penelaah Tata Naskah Dinas	1
21.	Pramubakti	1
22.	Pengemudi	1
Total		47

3.1.2 Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Komposisi Pegawai di Lingkungan Direktorat PPIJJ Tahun 2023 Berdasarkan Pendidikan

Tabel III.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	P3K	Pegawai non-PNS	KI	Jumlah
1.	S3	0	0	0	0	0
2.	S2	19	0	0	1	20
3.	S1	13	9	5	9	36
4.	D3	0	0	0	0	0
5.	SMA	0	0	1	0	1
6.	SMP	0	0	0	0	0
Total		32	9	6	10	57

Komposisi Pegawai di Lingkungan Direktorat PPIJJ Tahun 2023 Berdasarkan Usia

Tabel III.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

No	Usia	PNS	PPPK	Pegawai non-PNS	KI	Jumlah
1.	Dibawah 30 Tahun	7	0	1	5	13
2.	30 Tahun s/d 50 Tahun	20	8	5	5	38
3.	Diatas 50 Tahun	5	1	0	0	6
Total		32	9	6	10	57

3.2 Sarana Prasarana

Direktorat PPIJJ dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana kerja baik berupa barang fisik maupun non fisik (*software*). Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan bisa dipergunakan sesuai fungsinya. Fasilitas sarana dan prasarana tersebut terdapat pada rincian sebagai berikut:

Tabel III.6 Daftar Sarana dan Prasarana Direktorat PPIJJ

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	
1	3.05.02.04.002	AC SENTRAL-CASSETTE	5	Unit
2	3.05.02.04.004	AC SPLIT	1	Unit
3	3.05.01.05.053	ACCES CONTROL SYSTEM	1	Unit
4	3.05.02.03.005	AIR CLEANER	1	Unit
5	3.05.01.05.015	ALAT PENGHANCUR KERTAS	5	Unit
6	3.05.02.04.007	EXHAUSE FAN	1	Unit
7	3.05.01.04.005	FILLING CABINET BESI	3	Unit
8	3.05.01.05.058	FOCUSING SCREEN/LAYAR LCD PROJECTOR	1	Unit
9	3.05.02.05.008	KITCHEN SET	1	Unit
10	3.05.02.01.003	KURSI BESI/METAL	2	Unit
11	3.05.02.01.020	KURSI FIBER GLAS/PLASTIK	54	Unit
12	3.10.01.02.002	LAPTOP	3	Unit
13	3.05.01.05.048	LCD PROJECTOR/INFOCUS	2	Unit
14	3.05.01.04.001	LEMARI BESI/METAL	16	Unit
15	3.05.01.04.002	LEMARI KAYU	2	Unit
16	3.05.02.01.002	MEJA KERJA KAYU	39	Unit
17	3.05.02.01.019	MEJA MAKAN KAYU	2	Unit
18	3.05.02.01.008	MEJA RAPAT	2	Unit
19	3.05.02.01.014	MEJA RESEPSIONIS	1	Unit
20	3.05.02.01.033	SOFA 1 SEATER	3	Unit

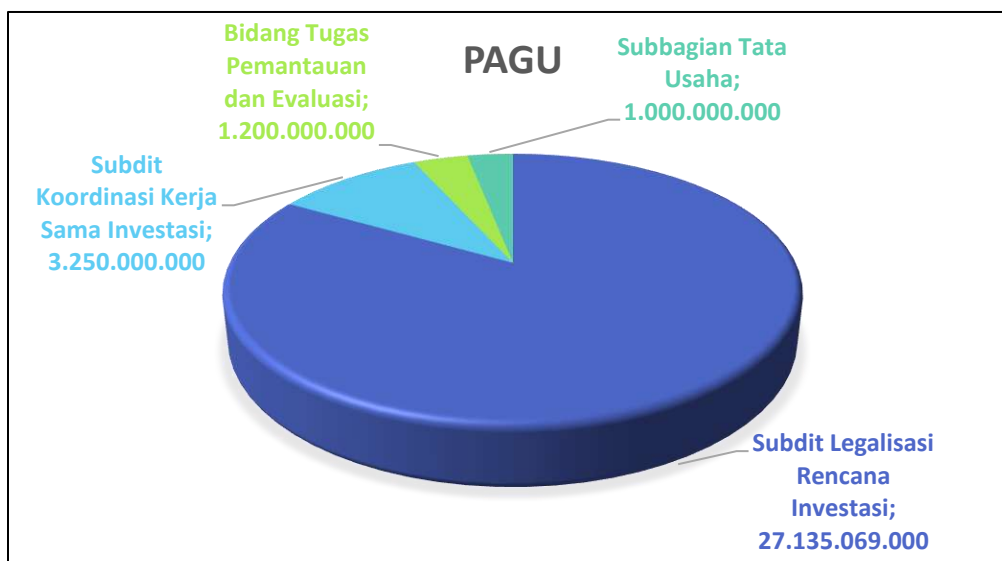
No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	
21	3.05.02.01.026	NAKAS	6	Unit
22	3.10.01.02.003	NOTEBOOK	3	Unit
23	3.10.01.02.001	P.C UNIT	19	Unit
24	3.10.02.03.003	PRINTER	28	Unit
25	3.05.01.04.004	RAK KAYU	1	Unit
26	3.10.02.03.004	SCANNER	1	Unit
27	3.05.02.06.002	TELEVISI	2	Unit
28	3.05.01.05.010	WHITE BOARD	1	Unit
TOTAL			206	Unit

Sumber: Satker Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Alokasi Anggaran kegiatan Direktorat PPIJJ dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara murni Bagian Anggaran (BA) 033 dan *loan* yang digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Mengacu pada DIPA Revisi ke-9 Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2023 tanggal 22 Desember 2023, total pagu anggaran Direktorat PPIJJ Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 32.585.069.000,-. Anggaran tersebut kemudian dialokasikan kepada unit pelaksana dalam organisasi Unit Kerja sesuai dengan peran, tugas dan fungsi masing-masing unit dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat PPIJJ tahun 2023.



Gambar III-1 Pagu Anggaran Direktorat PPIJJ TA 2023 Berdasarkan Unit Pelaksana

Berdasarkan gambar diatas, Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi menerima alokasi anggaran terbesar di Direktorat PPIJJ yaitu sebesar Rp 27.135.069.000,-. Besaran angka tersebut sudah termasuk adanya Fasilitas *loan* ADB untuk paket kegiatan *Toll Roads and Bridges FBC and Bidding Documents Development* sebesar Rp 19.766.525.000,-. Pada awalnya Fasilitas *loan* ADB tersebut adalah sebesar Rp 28.899.202.000,- namun berdasarkan aplikasi *E-Monitoring* per tanggal 26 Desember 2023, nilai tersebut dilakukan *drop loan* sehingga pagunya menjadi sebesar Rp 19.766.525.000,-. Dengan anggaran yang telah dialokasikan, Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi diharapkan dapat menjalankan tugas dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan legalisasi rencana investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

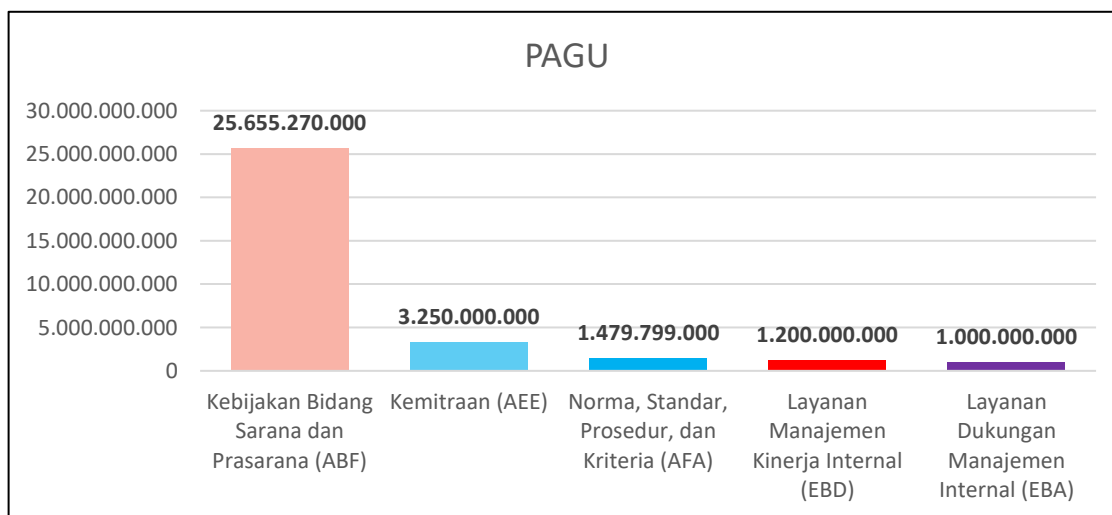
Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi diberikan alokasi anggaran sebesar Rp 3.250.000.000,-. Anggaran ini bertujuan untuk membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak terutama calon investor, baik di dalam negeri maupun luar negeri serta memfasilitasi dialog dan kesepakatan investasi. Adapun dalam penggunaan alokasi anggaran tersebut, Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi melaksanakan kegiatan seperti *Market Sounding*, *Market Consultation*, Fasilitas Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP), dan Fasilitas Pembentukan Badan Penyiapan Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan. Pada tahun 2023 ini, Subdit Koordinasi Kerja Sama Investasi juga menganggarkan untuk kegiatan pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), hal tersebut dikarenakan Direktorat PPIJJ ditunjuk sebagai *pilot project* kegiatan SMAP di lingkungan DJPI.

Bidang Tugas Pemantauan dan Evaluasi menerima alokasi anggaran sebesar Rp 1.200.000.000,-. Anggaran ini digunakan untuk melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap berbagai proyek infrastruktur sektor jalan dan jembatan serta memberikan dukungan teknis dan administratif yang diperlukan.

Subbagian Tata Usaha diberikan alokasi anggaran sebesar Rp 1.000.000.000,-. Anggaran ini diperuntukkan untuk mendukung kebutuhan operasional Direktorat PPIJJ seperti pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

Kemudian, apabila total pagu anggaran Direktorat PPIJJ Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 32.585.069.000 diklasifikasikan berdasarkan kategori output, anggaran Direktorat PPIJJ terbagi ke dalam lima kategori. Kategori tersebut terdiri dari Kebijakan Bidang Sarana dan

Prasarana (ABF), Kemitraan (AEE), Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (AFA), Layanan Manajemen Kinerja Internal (EBD), dan Layanan Dukungan Manajemen Internal (EBA). Berikut grafik pagu anggaran berdasarkan klasifikasi output.



Gambar III-2 DIPA Direktorat PPIJJ TA 2023 Berdasarkan Klasifikasi Output

3.4 Analisis Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran merupakan faktor yang penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam melakukan analisis SDM perlu mengidentifikasi kebutuhan, penempatan, serta pengembangan seluruh pegawai di lingkungan Direktorat PPIJJ. Kemudian, analisis anggaran ditujukan untuk memastikan pengalokasian dana dapat optimal serta tepat sasaran. Keselarasan antara data SDM dengan anggaran bertujuan untuk keberlanjutan organisasi, menciptakan lingkungan kerja yang produktif, finansial yang terkendali dan mampu mencapai target kinerja yang diharapkan.



Gambar III-3 Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Direktorat PPIJJ

Pada tahun 2022 jumlah pegawai di Direktorat PPIJJ sebanyak 54 pegawai dengan komposisi 32 orang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 9 orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 13 orang adalah Tenaga Pendukung Individual. Pada tahun 2023 jumlah pegawai di Direktorat PPIJJ bertambah menjadi sebanyak 57 pegawai dengan komposisi 32 orang PNS, 9 orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 6 orang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan 10 orang Tenaga Pendukung Individual. Tambahan pegawai tersebut karena adanya pegawai PPPK yang ditempatkan di Direktorat PPIJJ sebanyak 3 orang. Selain itu, adanya penambahan jumlah pegawai dikarenakan adanya pertumbuhan organisasi, penambahan jumlah proyek sektor jalan dan jembatan yang cukup masif, dan beban kerja yang terus meningkat sehingga dibutuhkan sumber daya manusia tambahan untuk mengatasi hal tersebut. Dengan adanya penambahan pegawai serta didukung dengan tersedianya anggaran yang optimal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kinerja, menambah produktivitas, menciptakan lingkungan kerja yang seimbang, dan dapat menghasilkan output yang telah ditargetkan.



BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan sebagai perwujudan



Gambar IV-1 Jalan Lintas Timur Sumatera - Riau

dari amanah yang tertuang dalam Permen PAN/RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dapat dilakukan melalui upaya strategis yang terarah dan terimplementasi. Direktorat PPIJJ telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja melalui pelaksanaan pelaporan dan pembahasan evaluasi kinerja secara berkala dan konsisten. Pada Tahun 2023 mekanisme pembahasan akuntabilitas evaluasi capaian kinerja dilakukan per triwulanan bersama mitra kerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja dilakukan per bulan.

Penerapan Evaluasi AKIP tingkat Eselon II dilaksanakan pada Bulan Mei 2023, dimana Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan bertindak sebagai Evaluator Direktorat PPIJJ. Dari hasil pelaksanaan Evaluasi AKIP tersebut, Direktorat PPIJJ mendapatkan penilaian “Sangat Baik” dengan perolehan nilai 79,81% dimana nilai tersebut naik dari perolehan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 78,93%. Dari penerapan Evaluasi AKIP tersebut, rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Direktorat PPIJJ telah menindaklanjutinya. Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan SAKIP di Direktorat PPIJJ dijelaskan dalam tabel dibawah.

Tabel IV.1 Tabel Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Atas Pelaksanaan SAKIP Tahun 2022 Direktorat PPIJJ

No.	Komponen/ Subkomponen	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	PERENCANAAN KINERJA			
a.	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	Telah terdapat pedoman teknis serta dokumen perencanaan kinerja, namun belum dapat memenuhi kriteria telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir dikarenakan DJPI baru berdiri pada 2019 berdasarkan Permen PUPR Nomor 3/PRT/M2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Perencanaan Kinerja dengan mengimplemaentasikan pedoman Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR baru dilaksanakan pada TA.2020	Rekomendasi 1: Melakukan koordinasi terkait <i>crosscutting</i> hubungan kinerja, atas Sasaran Strategis yang pencapaiannya melibatkan Unit Organisasi lain, sehingga didapatkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktifitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>crosscutting</i>);	Rekomendasi 1: Terdapat Nota Dinas Rapat koordinasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dengan unit organisasi lain. Salah satunya surat Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Nomor 07/MD/TPM/2023 perihal Pelaksanaan Penjaminan Mutu Kegiatan Pegadaan KPBU Sektor Jalan Tol untuk Proyek Jalan Tol Kediri – Tulungagung
b.	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum terdapat bukti rapat pembahasan terkait substansi dokumen perencanaan kinerja yaitu Renja (Rencana Kerja) yang melibatkan pimpinan sebagai upaya yang dapat dihargai; 2) Belum dilakukan koordinasi terkait <i>crosscutting</i> hubungan kinerja, atas Sasaran Strategis yang pencapaiannya melibatkan Unit Organisasi lain, sehingga belum didapatkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>crosscutting</i>) 	Rekomendasi 2: Pimpinan DJPI telah terlibat dalam Perencanaan Kinerja, namun belum efektif dimana masih diperlukan adanya keikutsertaan dalam hasil pemantauan capaian kinerja sesuai Rencana Aksi yang telah disusun, dan diperlukan adanya pemantauan secara berkala serta reuiu atau verifikasi secara berjenjang atas capaian kinerja berdasarkan Rencana Aksi, sehingga Rencana Aksi dapat berjalan secara dinamis;	Rekomendasi 2: Penyelenggaraan pembahasan monev kinerja, pembahasan penyusunan PK dan Rencana Aksi. Merupakan bentuk keterlibatan Pimpinan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sesuai rekomendasi nomor 2.
c.	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemantauan yang melibatkan pimpinan belum dilakukan secara berkala untuk capaian kinerja sesuai Rencana Aksi serta pembahasan capaian kinerja 	Rekomendasi 3: Melakukan perbaikan pada Rencana Aksi tahun berikutnya yaitu:	Rekomendasi 3: a) Revisi POK pada beberapa paket kegiatan menyebabkan terjadinya pergeseran dan perubahan pagu

No.	Komponen/ Subkomponen	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		<p>Rencana Aksi hanya dilakukan pada bulan Desember yang urgensinya lebih pada sebagai pendukung sumber dana untuk menyusun Lakin Eselon I;</p> <p>2) Bentuk verifikasi atas capaian kinerja sesuai Rencana Aksi belum dilakukan secara berjenjang dari Tim Penyusun hingga Eselon I, hanya diprakarsai oleh Direktorat PSPP yang berwenang atas tugas pokok dan fungsi penyusunan Lakin Eselon I;</p> <p>3) Laporan Monev Bulanan telah menyajikan pantauan atas rencana aksi dengan indikator yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja, namun masih terdapat ketidaksesuaian antara target rencana kinerja yang termuat dalam Laporan Monev Bulanan dengan Rencana Aksi;</p> <p>4) Perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang dilakukan belum menyeluruh yaitu atas:</p> <p>a) Analisis permasalahan pada Rencana Aksi sebagaimana rekomendasi Laporan hasil Evaluasi SAKIP periode sebelumnya dan belum terdapat pemecahan masalah/solusi dalam Rencana Aksi TA.2022;</p> <p>b) Belum ada kebijakan <i>reward and punishment</i> atas hasil evaluasi SAKIP internal DJPI, sehingga hasil evaluasi belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di Unit Kerja.</p>	<p>a) Kesesuaian target pada Rencana Aksi dan Laporan Monev Bulanan serta menyajikan penjelasan atas adanya perbedaan;</p> <p>b) Menyajikan rencana pemecahan masalah/solusi atas permasalahan pada Rencana Aksi sebagaimana rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP periode sebelumnya;</p> <p>c) Memanfaatkan hasil capaian kinerja untuk pemberian promosi atau kenaikan/penurunan insentif terkait dengan <i>reward and punishment</i>.</p>	<p>anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan pada beberapa target Rencana Aksi dan Laporan Monev Bulanan.</p> <p>b) Monev Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan jembatan telah dilakukan pada bulan Agustus 2023 berdasarkan surat Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Nomor UM 0102-Pj/542 perihal Undangan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan TA 2022;</p> <p>c) Kebijakan untuk memanfaatkan hasil capaian kinerja untuk pemberian promosi atau kenaikan/penurunan insentif terkait <i>reward and punishment</i> belum ada di lingkungan DJPI.</p>
			<p>Rekomendasi 4: Melakukan penertiban administrasi atas pelaksanaan bukti rapat pembahasan terkait substansi dokumen perencanaan kinerja, khususnya yang melibatkan pimpinan.</p>	<p>Rekomendasi 4: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan tertib menggunakan TNDE, Nota Dinas, surat pengantar serta lembar kendali sebagai bentuk tertib administrasi atas pelaksanaan rapat pembahasan perencanaan kinerja.</p>

No.	Komponen/ Subkomponen	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
2. PENGUKURAN KINERJA				
a.	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	Terdapat SOP Penyelenggaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DJPI yaitu SE No.05/SE/Dp/2023 baru disahkan pada 12 Juni 2023, namun belum dapat memenuhi kriteria telah dipertahankan setidaknya 5 tahun terakhir.	Rekomendasi 1: Menyajikan setiap capaian indikator kegiatan untuk persentase fisik yang relevan dengan pencapaian output masing-masing kegiatan dalam Laporan Monev Bulanan maupun e-Monitoring, sehingga mewakili kinerja utama dan kondisi yang ingin diwujudkan;	Rekomendasi 1: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan selalu menyajikan setiap capaian indikator kegiatan untuk persentase fisik yang relevan dengan pencapaian <i>output</i> masing-masing kegiatan dalam Laporan Monev Bulanan maupun e-Monitoring dan selalu berkoordinasi dengan Direktorat PSSPP sebagai pengampu Laporan Monev Bulanan Eselon I;
b.	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	Penilaian data kinerja telah mewakili (representatif) kinerja (sasaran) utama atau kondisi yang akan diwujudkan, dan data kinerja telah mengindikasikan (mencerminkan) terwujudnya Kinerja atau sasaran yang telah ditetapkan, namun terdapat catatan yaitu: 1) Berdasarkan penjelasan dari Setditjen bahwa data kinerja dalam Laporan Monev Bulanan dalam perhitungan capaian indikator kegiatannya didapatkan dari perbandingan realisasi dan rencana fisik, dengan formula untuk perhitungan persentase fisik merupakan hasil dari persentase nilai keuangan dari kegiatan yang sudah terlaksana sampai dengan bulan berkenaan (baik kegiatan yang sudah cair keuangannya maupun kegiatan yang sudah terlaksana namun belum cair keuangannya). Maka dalam hal ini dasar perhitungan pekerjaan fisik adalah pencairan keuangan. Sementara nilai persentase keuangan dihitung dari jumlah keuangan yang sudah dicairkan kegiatannya sampai dengan bulan berkenaan. Perhitungan dengan metode tersebut juga dilakukan pada cara perhitungan dalam menampilkan capaian kinerja tiap kegiatan di e-monitoring. Berdasarkan penjelasan tersebut maka	Rekomendasi 2: Memperhitungkan Penilaian Kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dalam aplikasi perhitungan tunjangan kinerja; Rekomendasi 3 : Menyajikan hasil perbaikan dari Rencana Tindak lanjut bulan sebelumnya dalam Laporan Monev Bulanan sehingga dapat diketahui tingkat keefektifan pelaksanaan rencana tindak lanjut bulan sebelumnya;	Rekomendasi 2: - Rekomendasi 3: Hasil tindak lanjut Laporan Monev Bulanan periode sebelumnya telah disajikan pada Laporan Monev Bulanan periode Agustus Tahun 2023 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

No.	Komponen/ Subkomponen	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		<p>data dalam perhitungan persentase setiap capaian indikator kinerja kegiatan belum mendukung dalam perhitungan capaian kinerja pada sasaran sesuai Perjanjian Kinerjanya. Maka dapat disimpulkan bahwa data kinerja dalam Laporan Monev Bulanan dan e-Monitoring untuk perhitungan realisasi fisik belum sepenuhnya mewakili kinerja utama dan kondisi yang ingin diwujudkan;</p> <p>2) Proses Pemantauan dan Verifikasi pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkala belum melibatkan peranan pimpinan, sebagai berikut:</p> <p>a) Pemantauan dari pimpinan belum dilakukan secara berkala untuk setiap Laporan Monev Bulanan, pembahasan hanya dilakukan secara berkala pada bulan terakhir yaitu Laporan Monev Bulan Desember dengan urgensi sebagai pendukung sumber data dalam menyusun Lakin Eselon I;</p> <p>b) Bentuk verifikasi capaian kinerja dalam Laporan Monev Bulanan belum dilakukan secara berjenjang dari Tim Penyusun hingga Eselon I, hanya diprakarsai oleh Direktorat PSSPP yang berwenang atas tugas pokok dan fungsi penyusunan Lakin Eselon I.</p>	<p>Rekomendasi 4 : Melakukan pemantauan secara berkala serta verifikasi secara berjenjang dari Tim Pelaksana hingga melibatkan pimpinan atas pengukuran kinerja dalam Laporan Monev Bulanan</p> <p>Rekomendasi 5: Melakukan penertiban administrasi atas pelaksanaan bukti rapat pembahasan pemantauan berkala hingga verifikasi secara berjenjang terkait substansi pengukuran capaian kinerja, khususnya yang melibatkan pimpinan.</p>	<p>Rekomendasi 4: Pengukuran kinerja dalam laporan monev bulanan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan selalu melibatkan pimpinan serta selalu ada pemantauan secara berkala dan verifikasi secara berjenjang. Draft Laporan Monev disampaikan kepada SKBT dan diverifikasi oleh KBT hingga diterima oleh Direktur.</p> <p>Rekomendasi 5: Penertiban administrasi atas pelaksanaan bukti rapat pembahasan terkait substansi dokumen pengukuran kinerja, khususnya yang melibatkan pimpinan telah diwujudkan dalam beberapa hal yaitu pembuatan Nota Dinas (Surat Pengantar), TNDE, Penggunaan formulir lembar kendali, dan penyimpanan dokumentasi kegiatan serta perbaikan/saran.</p>

No.	Komponen/ Subkomponen	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
3. PELAPORAN KINERJA				
a.	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	<p>1) Laporan Kinerja dan pendukung Laporan lainnya yang menggambarkan kinerja tidak disampaikan dan tidak dipublikasikan tepat waktu, yaitu:</p> <p>a) Laporan Kinerja tertanggal 20-01-2023, sehingga tidak memenuhi kriteria LAKIN seharusnya disampaikan paling lambat 2 minggu setelah Tahun Anggaran berakhir;</p> <p>b) Laporan Kinerja diupload di e-SAKIP per tanggal 17-03-2023, sehingga tidak memenuhi kriteria LAKIN seharusnya disampaikan paling lambat 2 minggu setelah Tahun Anggaran berakhir;</p> <p>c) Laporan Monev Kinerja Bulanan telah diupload di e_SAKIP namun tidak memenuhi kriteria disusun dan disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah bulan yang bersangkutan berakhir.</p> <p>2) Reviu atas Laporan Kinerja dan Laporan Monev Bulanan belum dilakukan secara berjenjang dan berkala.</p>	<p>Rekomendasi 1:</p> <p>Menyusun dan mempublikasikan Laporan Kinerja dan Laporan Monev Bulanan pada tahun berikutnya secara tepat waktu sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di kementerian PUPR;</p>	<p>Rekomendasi 1:</p> <p>Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan masih terkendala melakukan <i>upload</i> laporan monev bulanan pada e-sakip dengan tepat waktu dikarenakan penyesuaian terhadap format laporan monev bulanan yang baru. Untuk laporan monev bulanan periode Oktober 2023 dan seterusnya, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan berupaya untuk menyusun dan mempublikasikan laporan monev bulanan dengan tepat waktu sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR.</p>
b.	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta Upaya perbaikan/penyempurnaan ya.	<p>Laporan Kinerja telah diformalkan namun tidak tepat waktu dan belum disusun sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR, sebagai berikut:</p> <p>1) Pada Ringkasan Eksekutif, tidak diuraikan kendala dan langkah untuk mengatasi, serta langkah antisipatif kendala yang akan datang;</p>	<p>Rekomendasi 2:</p> <p>Menyusun Laporan Kinerja tahun berikutnya dengan sistematika dan substansi sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di kementerian PUPR;</p>	<p>Rekomendasi 2:</p> <p>Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan telah menyesuaikan sistematika penulisan Laporan Kinerja sesuai sistematika yang berlaku dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di kementerian PUPR.</p>

No.	Komponen/ Subkomponen	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		<p>2) Pada 4.3 Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran, tidakdiuraikan mengenai perubahan DIPA dan latar belakang perubahannya;</p> <p>3) Pada Tabel 4.37 Perbandingan Capaian IKSS dan IKSP DJPI Tahun 2022, diketahui untuk IKSS Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan efisiensi dan efektif mengalami penurunan kinerja TA.2021 adalah 110,01% sedangkan pada TA.2022 adalah 107,57%, di dalam LAKIN tidak dijelaskan mengenai alasan/hambatan/kendala atas penurunan kinerja tersebut;</p> <p>4) Laporan Kinerja tidak memuat hal yang inovatif dan dijadikan percontohan nasional, hanya membahas terkait kinerja yang telah dilaksanakan.</p>	<p>Rekomendasi 3: Menyajikan segala informasi ketidaktercapaian mengenai alasan/hambatan/kendala atas penurunan kinerja sebagai informasi dalam Laporan Kinerja;</p> <p>Rekomendasi 4: Melakukan verifikasi atau reviu secara berjenjang dari Tim Pelaksana hingga melibatkan pimpinan atas Laporan Kinerja.</p>	<p>Rekomendasi 3: Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk TA 2023 disusun sesuai dengan hasil evaluasi AKIP TA 2022 dan menyajikan segala informasi ketidaktercapaian mengenai alasan/hambatan/kendala atas kinerja</p> <p>Rekomendasi 4: Laporan monev bulanan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan akan rutin menggunakan lembar kendali sebagai tindak lanjut untuk memfasilitasi verifikasi atau reviu secara berjenjang dari Tim Pelaksana hingga melibatkan pimpinan</p>
c.	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.	Informasi dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya berpengaruh dalam perubahan budaya kinerja organisasi, yaitu dalam penyusunan Lakin. Segala informasi ketidaktercapaian belum dijelaskan mengenai alasan/hambatan/kendala atas penurunan kinerja tersebut.		
4.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL			
a.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	Belum terpenuhi dokumen LHE Eselon II selama 5 tahun dikarenakan pada Tahun 2020 terdapat perubahan struktur organisasi tingkat Eselon II.	Rekomendasi 1: Mengikutsertakan Tim Evaluator Internal dalam Diklat/Bimbingan Teknis Evaluasi SAKIP yang diselenggarakan oleh Kementerian/Instansi terkait;	Rekomendasi 1: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan telah mengikuti penyelenggaraan <i>Workshop</i> Evaluasi AKIP bagi Tim Evaluator DJPI yang diselenggarakan oleh Direktorat PSSPP. Direktorat
b.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara	1) Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Internal belum seluruhnya memiliki		

No.	Komponen/ Subkomponen	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	sertifikat diklat atau bimtek terkait evaluasi SAKIP; 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi), yaitu Evaluasi SAKIP di Unit Kerja DJPI menggunakan MS Excel dan untuk pengumpulan dokumen menggunakan <i>Google Drive</i> .		Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan siap untuk menugaskan Tim Evaluator pada Diklat/Bimbingan Teknis Evaluasi AKIP yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.
c.	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	1) Dari hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal eselon II dan Eselon I tahun 2021 yang terdapat di Laporan Kinerja 2022, belum seluruhnya ditindaklanjuti. Sehingga belum seluruhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja; 2) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, yaitu perhitungan efisiensi anggaran DJPI tidak bisa dibandingkan dikarenakan efisiensi tahun 2022 menggunakan dasar IKSP sedangkan tahun 2021 menggunakan dasar IKSS, dan Analisis pada beberapa unit kerja di DJPI belum menjelaskan perbandingan persentase antara efisiensi/efektifitas tahun berjalan dengan tahun sebelumnya; 3) Belum terdapat bukti-bukti pendukung atas pembahasan tindak lanjut dan pembahasan mengenai peningkatan Capaian Kinerja berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebagai bukti pendukung pelaksanaan perbaikan	Rekomendasi 2: Berkoordinasi dengan Biro PAKLN dalam upaya peningkatan implementasi SAKIP dengan pelaksanaan evaluasi internal maupun unit organisasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) Rekomendasi 3: Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal eselon II dan Eselon I tahun sebelumnya, sehingga seluruh perbaikan berkelanjutan dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan akuntabilitas kinerja;	Rekomendasi 2: - Rekomendasi 3: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan memproses tindak lanjut hasil evaluasi AKIP sesuai LHE dan BA yang telah disepakati dengan tim evaluator. Bukti tindak lanjut ada pada laporan monev bulanan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan juga sudah melakukan Rapat Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan TA 2022 pada tanggal 25 Agustus 2023

No.	Komponen/ Subkomponen	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	<p>Rekomendasi 4: Menyajikan perbandingan persentase antara efisiensi/efektifitas tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Kinerja;</p> <p>Rekomendasi 5: Melakukan penertiban administrasi atas pelaksanaan bukti-bukti rapat pembahasan tindak lanjut rekomendasi dan pembahasan mengenai Capaian Kinerja berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebagai bukti pendukung pelaksanaan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.</p>	<p>Rekomendasi 4: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan akan menyajikan perbandingan persentase antara efisiensi/efektifitas tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Kinerja periode tahun berjalan.</p> <p>Rekomendasi 5: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan telah melaksanakan Rapat Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP TA 2022 pada Jumat, 25 Agustus 2023 bersama Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.</p>

4.2 Pelaksanaan dan Hasil Evaluasi SAKIP

Implementasi SAKIP telah diatur di dalam Permen PANRB Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi Implementasi SAKIP memiliki beberapa komponen yang masing-masing mempunyai bobot penilaian. Kegiatan evaluasi implementasi AKIP Direktorat PPIJJ pada tahun 2022 di evaluasi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (selaku evaluator). Berdasarkan penilaian evaluator, implementasi SAKIP Direktorat PPIJJ Tahun 2022 mendapatkan nilai sebesar 79,81% dengan kategori BB yang memiliki arti bahwa Sangat Baik. Nilai tersebut meningkat 0,88% apabila dibandingkan dengan hasil implementasi SAKIP pada tahun sebelumnya dengan nilai 78,93%. Berikut tabel penilaian evaluasi SAKIP Direktorat PPIJJ tahun 2022 dan tahun 2021:

Tabel IV.2 Komponen dan Bobot Penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2022

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maksimal	Nilai Hasil Evaluasi TA 2022
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,60%
2	Pengukuran Kinerja	30%	23,10%
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,80%
4	Evaluasi Internal	25%	21,00%
TOTAL		100%	79,81%

Tabel IV.3 Komponen dan Bobot Penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2021

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maksimal	Nilai Hasil Evaluasi TA 2021
1	Perencanaan Kinerja	30%	27,09%
2	Pengukuran Kinerja	25%	21,43%
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,63%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10%	8,25%
5	Capaian Kinerja	20%	11,53%
TOTAL		100%	78,93%

4.3 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan wujud dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi melalui sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara periodik dilaporkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang berisi ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas mengenai capaian atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Capaian kinerja Direktorat PPIJJ dilaporkan pada Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan merupakan realisasi kinerja Direktorat PPIJJ Tahun Anggaran 2023.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat ditegaskan bahwa upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan produktivitas kinerja, instansi pemerintah diharuskan menyampaikan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah yang dihasilkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan metode perhitungan yang terdapat di dalam Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 – 2024 dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja berdasarkan target pada Renstra dengan kinerja yang telah dicapai Direktorat PPIJJ.

Cascading merupakan struktur penurunan program hingga paket kegiatan, struktur penurunan tersebut terdiri atas Sasaran Strategis (SS) yang diturunkan menjadi Sasaran Program (SP) yang dibagi menjadi beberapa Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) kemudian diturunkan kembali menjadi Sasaran Kegiatan dengan Indikator Kinerja (IKSK). Sasaran Kegiatan dan IKSK diturun menjadi beberapa Klasifikasi Rincian Out (KRO) yang diturunkan menjadi Rincian Output (RO) dengan Indikator Rincian Output. RO dan Indikator RO diturunkan menjadi Paket Kegiatan yang dilaksanakan. Berikut ini uraian Struktur *Cascading* Direktorat PPIJJ sesuai target yang harus dicapai berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan DIPA tahun 2023:

Tabel IV.4 Cascading Direktorat PPIJJ Tahun 2023

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKK	Janis Indikator	KRO (Kode RO)	RO	Satuan	Target Renstra	Target DIPA Rev9	Target PK	Bobot RO
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya								
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan								
Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan paket pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan (50%)	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (ABF)	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	25%	5%
			Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	-		-
			Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	3	5		30%
			Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	1		10%

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKK	Janis Indikator	KRO (Kode RO)	RO	Satuan	Target Renstra	Target DIPA Rev9	Target PK	Bobot RO
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya								
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan								
		Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (AFA)	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NSPK	1	2		10%
	Tingkat implementasi kegiatan transaksi paket pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan (50%)	Kemitraan (AEE)	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	12	2		25%
		Layanan Manajemen Kinerja Internal (EBD)	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	5	5		20%

Sumber: Renja Dit. PPIJJ Tahun 2023

Mengacu pada Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2023, Direktorat PPIJJ melaksanakan 17 (tujuh belas) kegiatan selama Tahun Anggaran 2023 yang mendukung kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Namun terdapat perbedaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat PPIJJ berdasarkan target DIPA 2023 jika dibandingkan dengan target yang tertuang pada Renstra. Beberapa Rincian Output yang memiliki perbedaan target pada Renstra dan DIPA TA 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dengan Indikator Rincian Output Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024 memiliki target sebanyak 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan, namun pada DIPA TA 2023 tidak dianggarkan sehingga tidak ada output.
- b. Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024 memiliki target sebanyak 3 (tiga) Rekomendasi Kebijakan, sedangkan pada DIPA TA 2023 terdapat target sebanyak 5 (lima) Rekomendasi Kebijakan dengan Indikator Rincian Output yaitu Jumlah Penyusunan Dokumen Pendukung *Final Business Case* (FBC) Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan sebanyak 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan, Jumlah Penyusunan Dokumen *Final Business Case* (FBC) Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan melalui Fasilitas Loan ADB sebanyak 3 (tiga) Rekomendasi Kebijakan, dan Jumlah Penyusunan Dokumen Pendukung *Final Business Case* (FBC) Proyek KPBU Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta sebanyak 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan.
- c. Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024 memiliki target sebanyak 2 (dua) Rekomendasi Kebijakan, sedangkan pada DIPA TA 2023 terdapat target sebanyak 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan dengan Indikator Rincian Output yaitu Jumlah Penyusunan Dokumen Pendukung Studi Kelayakan Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan.
- d. Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan pada Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024 memiliki target sebanyak 12 (dua belas) Kesepakatan, sedangkan didalam DIPA TA 2023 terdapat target sebanyak 2 (dua) Kesepakatan.
- e. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024 memiliki target sebanyak 1 (satu) NSPK, sedangkan pada DIPA TA 2023 terdapat target sebanyak 2

(dua) NSPK. Hal ini karena adanya penambahan kegiatan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada bulan Agustus 2023, sehingga Indikator Rincian Output terdiri dari Jumlah Penyusunan NSPK Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, serta Jumlah Penyusunan Dokumen Rekomendasi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan Tol.

- f. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024 memiliki target sebanyak 4 (empat) Laporan, sedangkan di dalam DIPA TA 2023 terdapat target sebanyak 5 (lima) Laporan. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dilakukan terhadap masing-masing tahapan KPBU sektor Jalan dan Jembatan yaitu Tahap Penyiapan dan Tahap Transaksi, melakukan Kajian Evaluasi Manfaat dan Dampak Hasil Pembangunan Proyek Infrastruktur KPBU Jalan dan Jembatan (Wilayah I dan Wilayah II), serta kegiatan Supervisi Atas Implementasi Aspek Pembiayaan pada Proyek Infrastruktur KPBU Sektor Jalan Non Tol.
- g. Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dengan Indikator Rincian Output Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024 memiliki target sebanyak 1 (satu) Laporan, namun pada DIPA TA 2023 *Not Applicable* (N/A) dikarenakan mengalami *Automatic Adjustment* sejak awal Tahun Anggaran 2022.

Dengan kondisi tersebut diatas, kinerja yang dicapai oleh Direktorat PPIJJ adalah sebagai berikut:

Tabel IV.5 Pencapaian Kinerja Direktorat PPIJJ Berdasarkan RO

RO	Satuan	Target Renstra	Target DIPA Rev9	Realisasi	Output
Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	Renja dan Dokumen Penganggaran
Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	3	5	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Readiness Criteria</i> Jalan Tol Tuban – Gresik (DPPT dan AMDAL) 2. <i>Readiness Criteria</i> Jalan Tol Cilacap – Yogyakarta 3. <i>Readiness Criteria</i> Jalan Tol Demak – Tuban 4. Dokumen FBC Jalan Tol Tuban – Gresik 5. Dokumen AMDAL serta ANDALALIN Jalan Tol Demak – Tuban dan Jalan Tol Cilacap – Yogyakarta
Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu FBC Jalan Akses Exit Toll 2. Finalisasi Trase Jalan Tol Bandara Juanda-Tanjung Perak / Surabaya <i>Eastern Ring Road</i> (SERR) <i>Bundling</i> O&M Jembatan Suramadu
Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	12	2	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Negosiasi dan Laporan Penjaminan Mutu Proyek KPBU AP Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim 2. Laporan Akhir Dokumen Fasilitasi Pembentukan Badan Penyiapan Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan (Proyek Jalan Tol Lingkar Selatan Bandung) yang terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. KAK Pengadaan Badan Penyiapan b. RAB Pengadaan Badan Penyiapan c. Tata Cara Pengadaan Badan Penyiapan 3. Dokumen Pengadaan Badan Penyiapan

RO	Satuan	Target Renstra	Target DIPA Rev9	Realisasi	Output
NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NSPK	1	2	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera 2. Rekomendasi Rekomendasi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan Tol, dengan Sub Output sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Evaluasi Skema Pelelangan KPBK Jalan Tol; b. Dokumen Evaluasi Standar Penyusunan Feasibility Study Perusahaan Jalan Tol; c. Dokumen Evaluasi Keberadaan TPM; dan d. Dokumen Standar Evaluasi dan Penilaian Dokumen Studi Kelayakan.
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	4	5	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Monev Bulanan Direktorat PPIJJ 2. <i>Pocketbook</i> 3. Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ 4. Kajian Evaluasi Manfaat dan Dampak Beroperasinya Infrastruktur Jalan Tol Simpang Susun Waru-Juanda, Surabaya-Gresik, Surabaya-Gempol, serta Surabaya-Mojokerto 5. Kajian ekonomi Evaluasi Manfaat dan Dampak Beroperasinya Infrastruktur Jalan Tol Ujung Pandang
Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	1	-	-	-

Atas pencapaian tersebut, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan mampu memenuhi jumlah target output pada masing-masing Rincian Output (RO) yang telah ditargetkan di dalam DIPA Revisi ke-9.

4.3.1 Analisis Capaian Kinerja

Direktorat PPIJJ mendukung pencapaian Program Dukungan Manajemen khususnya mendukung tercapainya **IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif**. Dalam hal ini, Direktorat PPIJJ berkontribusi melalui pelaksanaan proyek infrastruktur jalan dan jembatan. Capaian kinerja Direktorat PPIJJ pada tahun 2023 berdasarkan PK adalah sebesar 25%. Rincian Capaian IKK Direktorat PPIJJ dapat dilihat pada tabel IV.4.

Tabel IV.6 Capaian Kinerja Direktorat PPIJJ TA 2023

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKK	Janis Indikator	KRO (Kode RO)	RO	Satuan	Target Renstra	Target DIPA Rev9	Target PK (%)	Bobot RO (%)	Realisasi Capaian RO	Realisasi Capaian RO (%)	Total Capaian PK (%)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya											
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan											
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan paket pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan (50%)	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (ABF)	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	25%	5%	1	5%	25%
			Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	-		-	-	-	
			Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	3	5		30%	5	30%	
			Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	1		10%	1	10%	

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKK	Janis Indikator	KRO (Kode RO)	RO	Satuan	Target Renstra	Target DIPA Rev9	Target PK (%)	Bobot RO (%)	Realisasi Capaian RO	Realisasi Capaian RO (%)	Total Capaian PK (%)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya											
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan											
		Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (AFA)	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NSPK	1	2		10%	2	10%	
	Tingkat implementasi kegiatan transaksi paket pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan (50%)	Kemitraan (AEE)	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	12	2		25%	2	25%	
		Layanan Manajemen Kinerja Internal (EBD)	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	4	5		20%	5	20%	

Melalui capaian IKK sebesar 25% tersebut, Direktorat PPIJJ telah berkontribusi sebesar **26,92%** atas **Capaian IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif** di DJPI yaitu sebesar **98,95%**.

4.3.2 Capaian Kinerja Paket Pembiayaan Proyek KPBu Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2023

Direktorat PPIJJ mengemban tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan. Pelaksanaan tugas penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan dilaksanakan dalam bentuk Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dan Jumlah Proyek KPBu Sektor Jalan dan Jembatan. Adapun untuk proyek KPBu dengan skema pengembalian tarif (sektor Jalan Tol), Direktorat PPIJJ berwenang untuk menyiapkan dokumen perencanaan hingga tahap transaksi. Selanjutnya kewenangan untuk melaksanakan pelelangan berpindah ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Evaluasi terhadap capaian pelaksanaan paket pembiayaan KPBu di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) dikoordinasi oleh Direktorat Strategi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembiayaan (Direktorat PSSPP). Berdasarkan hasil kesepakatan, capaian paket yang dihitung atas progres pengusahaan proyek KPBu adalah proyek yang minimal telah menyelesaikan Tahapan Penyiapan (FBC/FS).

Dari total target 13 proyek KPBu yang siap dikerjasamakan di DJPI tahun 2023, Direktorat PPIJJ mampu merealisasikan sebanyak 5 dari 2 proyek yang ditargetkan sesuai PK Direktorat PPIJJ. Adapun Capaian Paket Pembiayaan Proyek KPBu sektor Jalan dan Jembatan Siap Dikerjasamakan yang dilaksanakan oleh Direktorat PPIJJ pada TA. 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.7 Capaian Paket Pembiayaan Proyek KPBu Sektor Jalan dan Jembatan TA 2023

TARGET DIPA DJPI TA. 2023		REALISASI			
JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI (Juta Rupiah)	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI (Juta Rupiah)	
2	66.432.251	5	Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Ciamis	37.147.000	135.750.000
			Jalan Tol Tuban – Babat – Lamongan – Gresik	23.332.000	
			Jalan Tol Demak – Tuban	49.607.000	
			Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi	22.840.000	
			Fly Over Sitinjau Lauik	2.824.000	

4.3.3 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel IV.8 Perbandingan Kinerja Direktorat PPIJJ dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis (SS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja SP (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Realisasi			
					2020	2021	2022	2023
	Program Dukungan Manajemen							
Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25%	25%	25%	25%

4.3.4 Analisis Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 terdapat 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang salah satunya adalah “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional salah satunya melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat PPIJJ, khususnya terkait konektivitas jalan.

Dalam RPJMN 2020 – 2024, Kementerian PUPR ditargetkan terbangunnya Jalan Tol Baru dan/atau Beroperasi sepanjang 2.500 km, Jalan Nasional Baru sepanjang 3.000 km dan terciptanya Kondisi Mantap Jalan Nasional sebesar 97%. Dalam mendukung target tersebut,

dibutuhkan dana kurang lebih sebesar Rp 573 Triliun dimana APBN hanya mampu mengalokasikan sebesar Rp 203 Triliun, sehingga terdapat *funding gap* sebesar Rp 370 Triliun. Salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Pencapaian kinerja realisasi Proyek KPBU di Direktorat PPIJJ yang siap dikerjasamakan dari tahun 2020 hingga 2023 telah menunjukkan kemajuan signifikan khususnya sektor jalan dan jembatan. Melalui serangkaian proyek yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PPIJJ, realisasi total capaian kinerja proyek KPBU sektor jalan dan jembatan yang siap dikerjasamakan sampai dengan tahun 2023 ini terbilang cukup baik. Berikut realisasi capaian kinerja proyek KPBU sektor jalan dan jembatan periode 2020-2023:

Tabel IV.9 Realisasi Capaian Kinerja Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan Periode 2020-2023

No	Nama Proyek	Nilai Investasi
Tahun 2020		Rp 63.481.300.000.000
1	Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Provinsi Riau	Rp 585.300.000.000
2	Jalan Tol Layang Cikunir-Karawaci	Rp 26.150.000.000.000
3	Sistem Transaksi Tol Non-Tunai Nirsentuh Berbasis <i>Multi Lane Free Flow</i> (MLFF)	Rp 2.920.000.000.000
4	Jalan Tol Semarang Harbour	Rp 12.130.000.000.000
5	Penggantian Dan/Atau Duplikasi Jembatan CH di Pulau Jawa	Rp 2.336.000.000.000
6	Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi	Rp 19.360.000.000.000
Tahun 2021		Rp 168.701.000.000.000
1	Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat	Rp 15.375.000.000.000
2	Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung	Rp 8.947.000.000.000
3	Jalan Tol Semanan-Balaraja	Rp 17.680.000.000.000
4	Jalan Tol Kediri-Tulungagung	Rp 10.490.000.000.000
5	Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg	Rp 18.620.000.000.000
6	Jalan Tol Akses Patimban	Rp 8.480.000.000.000
7	Jalan Tol JORR <i>Elevated</i> Ruas Cikunir-Ulujami	Rp 21.565.000.000.000
8	Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap	Rp 57.590.000.000.000
9	Jalan Tol Malang-Kepanjen	Rp 9.954.000.000.000
Tahun 2022		Rp 181.173.460.000.000
1	Jalan Trans Papua Ruas Jayapura – Wamena (Segmen Mamberamo – Elelim	Rp 3.116.460.000.000
2	Jalan Akses Exit Toll	Rp 7.900.000.000.000
3	Jalan Tol Cilacap - Yogyakarta	Rp 53.777.000.000.000

No	Nama Proyek	Nilai Investasi
4	Jalan Tol Demak - Tuban	Rp 56.580.000.000.000
5	Jalan Tol Ngawi - Babat	Rp 16.830.000.000.000
6	Jalan Tol Jember - Lumajang	Rp. 7.400.000.000.000
7	Jalan Tol Jember - Situbondo	Rp 10.290.000.000.000
8	Jalan Tol Tulungagung - Kepanjen	Rp 14.520.000.000.000
9	Jembatan Tanah Bumbu - Pulau Laut	Rp 2.460.000.000.000
10	Jembatan Muna - Buton	Rp 8.300.000.000.000
Tahun 2023		Rp 135.750. 000.000.000
1	Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis	Rp 37.147.000.000.000
2	Jalan Tol Tuban-Babat-Lamongan-Gresik	Rp 23.332.000.000.000
3	Jalan Tol Demak-Tuban	Rp 49.607.000.000.000
4	Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi	Rp 22.840.000.000.000
5	Fly Over Sitinjau Lauik	2.824.000.000.000
TOTAL		Rp 549.105.760.000.000

4.3.5 Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional (*Benchmarking*)

Perbandingan kinerja dengan standar nasional dilaksanakan dengan membandingkan kinerja antara Kementerian PUPR dengan instansi pemerintah lainnya yang terlibat dalam proses KPBU meskipun dengan fokus dan tanggung jawab yang berbeda seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Keuangan, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam keterlibatan pelaksanaan proses KPBU, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan LKPP memiliki peran yang penting dan strategis, namun pada instansi tersebut tidak menjadikan capaian KPBU sebagai salah satu target kinerja utama karena lebih berfokus pada pengaturan kebijakan dan koordinasi dibandingkan dengan implementasi langsung proyek KPBU. Sementara itu, Direktorat PPIJJ sebagai salah satu Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) di Kementerian PUPR secara langsung terlibat dalam pelaksanaan proyek KPBU khususnya di sektor jalan dan jembatan sehingga memiliki target kinerja yang lebih berkaitan langsung dengan realisasi proyek KPBU.

Tabel IV.11 Target Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	1 SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	75	80	85	90	95
		Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	85%	87,5%	90%	92,5%	95%
	2 SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	80-83,9%	84-87,9%	88-91,9%	92-95,9%	96-100%
Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	3 SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	3.1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	85-87,9%	88-90,9%	91-93,9%	94-96,9%	97-100%
		3.2. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	75-79,9%	80-84,9%	85-89,9%	90-94,9%	95-100%
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	4 SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	83,00	86,00	90,00	90,50	91,00
		b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	85	88	90	92	95
		c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	85%	88%	90%	92%	95%

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

Tabel IV.10 Target Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan							
	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Rasio Defisit terhadap PDB	(5,07%)	(3,21%)- (4,17%)	(2,79%)- (3,55%)	(2,35%)- (2,72%)	(2,19%)- (2,51%)	Kemenkeu (penyedia data: BKF)
		Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	75	75	75	75	75	Unit Eselon I terkait
2	Penerimaan negara yang optimal							
	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal	Rasio perpajakan terhadap PDB	8,51% - 8,69%	8,25%- 8,63%	8,27%- 8,70%	8,38%- 9,09%	8,59%- 9,55%	Kemenkeu (penyedia data: BKF)
		Persentase realisasi penerimaan Negara	100%	100%	100%	100%	100%	DJP, DJBC, DJA
		Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	53,5%	63%	64%	65%	66%	DJP, DJBC

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Pengelolaan belanja negara yang berkualitas							
	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	Indeks kualitas belanja pemerintah	80	81	82	83	84	DJA, DJPK
		Indeks ketimpangan antarwilayah	0,245 (skala 1)	0,242 (skala 1)	0,240 (skala 1)	0,235 (skala 1)	0,232 (skala 1)	DJPK
		Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	22,94%	25,94%	28,94%	31,94%	34,94%	DJPK
4	Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali							
	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3,10 (skala 4)	3,15 (skala 4)	3,20 (skala 4)	DJPb, DJPPR
		Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	DJPb, ITJEN
		Nilai kinerja anggaran K/L	80,2	81,2	81,2	82,2	82,2	DJPb, DJA
		Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	91%	92%	93%	94%	95%	DJPb
	Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	55%	57%	60%	65%	70%	DJKN
		Indeks efektivitas investasi pemerintah	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	DJKN, DJPPR, DJPb
	Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali	Imbal Hasil (Yield) Surat Berharga Negara	Naik	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	DJPPR
		Rasio Utang terhadap PDB	36,38%	36,67%-37,97%	36,65%-37,39%	36,45%-37,36%	36,08%-37,18%	Kemenkeu (penyedia data: BKF)
		Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	100%	100%	100%	100%	DJPPR

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien							
	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan	4 (skala 5)	4,05 (skala 5)	4,10 (skala 5)	4,15 (skala 5)	4,20 (skala 5)	Seluruh UE I, (Setjen c.q. Biro Organta Penyedia Data)
		Persentase penyelesaian <i>delayering</i>	100%	100%	100%	-	-	Setjen dan UE I Terkait
		Tingkat kualitas pengelolaan SDM Kementerian Keuangan	-	88,2%	89,0%	89,8%	90,5%	Setjen (Biro SDM Penyedia Data)
		Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	75%	77%	80%	82%	85%	Seluruh UE I (BPPK Penyedia Data)
		Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90%	80%	82%	85%	87%	BPPK
		Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal BAIK	90%	93%	-	-	-	BPPK
		Persentase pemenuhan <i>gap</i> kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran (CGI)	-	-	90%	92%	94%	BPPK
	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	Seluruh UE I Terkait (Setjen c.q. Pusintek Penyedia Data)
		Persentase penyelesaian proyek strategis TIK*	85%	87%	90%	92%	95%	Seluruh UE I Terkait, (Setjen c.q. Pusintek sebagai Penyedia Data)
	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Indeks integritas	90 (skala 100)	90,5 (skala 100)	91 (skala 100)	91,5 (skala 100)	92 (skala 100)	Seluruh UE I Terkait (Itjen

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Penyedia Data)
		Indeks opini BPK atas LK BA 015	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	Setjen, Itjen
	Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	96,87	100	100	100	100	BLU Pengelola Dana dan SMV terkait
		<i>Dwelling time</i>	3,6 hari - 2,9 hari	3,5 hari- 2,9 hari	3,4 hari- 2,9 hari	3,3 hari- 2,9 hari	3,2 hari- 2,9 hari	LNSW

Sumber: Renstra Kementerian keuangan Tahun 2020-2024

4.4 Realisasi Anggaran

Mengacu pada DIPA Revisi ke-9 Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2023 tanggal 22 Desember 2023, total pagu anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 32.585.069.000,-. Berdasarkan data *e-Monitoring Online* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, status tanggal 8 Januari 2024, realisasi keuangan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 32.200.700.000,- dengan persentase capaian keuangan sebesar 98,82% dan capaian fisik sebesar 99%.

Tabel IV.12 Capaian Realisasi Anggaran Direktorat PPIJJ pada Bulan Desember 2023

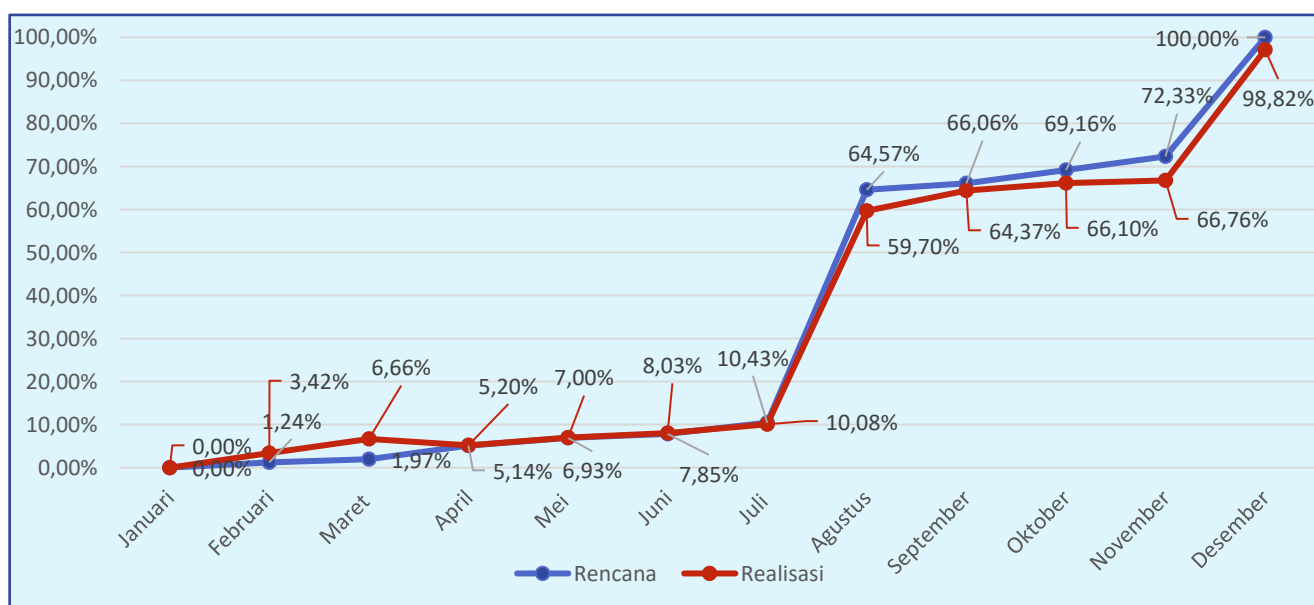
Subdit / Paket	Pagu (Dalam Ribu Rupiah)	Realisasi	Tahun 2023			
			Keu. (%)		Fis. (%)	
			Renc.	Real.	Renc.	Real.
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Tanpa PHLN)	12,818,544	12,626,564	100.00%	98.50%	96.00%	99.00%
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (PHLN)	32,585,068	31,674,353	100.00%	98.82%	99.00%	99.00%

Subdit / Paket	Pagu (Dalam Ribu Rupiah)	Realisasi	Tahun 2023			
			Keu. (%)		Fis. (%)	
			Renc.	Real.	Renc.	Real.
Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi						
Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana						
Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	570,000	559,015	100.00%	98.07%	100.00%	96.00%
Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan						
Penyusunan Dokumen Pendukung <i>Final Business Case</i> (FBC) Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	3,070,200	3,070,200	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Penyusunan Dokumen <i>Final Business Case</i> (FBC) Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan melalui Fasilitasi <i>Loan ADB</i>	19,766,525	19,574,136	100.00%	99.03%	100.00%	100.00%
Penyusunan Dokumen Pendukung <i>Final Business Case</i> (FBC) Proyek KPBU Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta	568,544	471,864	100.00%	83.00%	100.00%	83.00%
Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan						
Penyusunan Dokumen Pendukung Studi Kelayakan Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	1,680,000	1,671,016	100.00%	99.47%	100.00%	100.00%
Subdirektorat Koordinasi Rencana Investasi						
Kemitraan						
Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan						
Pelaksanaan <i>Market Sounding</i> Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sektor Jalan dan Jembatan	882,325	879,149	100.00%	99.64%	100.00%	100.00%
Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Korupsi	667,675	666.232	100.00%	99.78%	100.00%	100.00%

Subdit / Paket	Pagu (Dalam Ribu Rupiah)	Realisasi	Tahun 2023			
			Keu. (%)		Fis. (%)	
			Renc.	Real.	Renc.	Real.
Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sektor Jalan dan Jembatan	1,096,380	1,075,446	100.00%	98.09%	100.00%	99.00%
Fasilitasi Pembentukan Badan Penyiapan Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	603,620	596,147	100.00%	98.76%	100.00%	99.00%
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria						
NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan						
Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	800,000	787,568	100.00%	98.45%	100.00%	99.00%
Penyusunan Dokumen Rekomendasi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan Tol	679,799	679.448	100.00%	99.95%	100.00%	100.00%
Layanan Manajemen Kinerja Internal						
Layanan Pemantauan dan Evaluasi						
Pemantauan dan Evaluasi Tahap Penyiapan Proyek KPBU Sektor Jalan	240,000	237,796	100.00%	99.08%	100.00%	100.00%
Pemantauan dan Evaluasi Tahap Transaksi Proyek KPBU Sektor Jalan	240,000	233,125	100.00%	97.14%	100.00%	98.00%
Evaluasi Manfaat dan Dampak dari Beroperasinya Infrastruktur KPBU Jalan dan Jembatan Wilayah I	240,000	237,161	100.00%	98.82%	100.00%	99.00%
Evaluasi Manfaat dan Dampak dari Beroperasinya Infrastruktur KPBU Jalan dan Jembatan Wilayah II	240,000	238,789	100.00%	99.50%	100.00%	100.00%

Subdit / Paket	Pagu (Dalam Ribu Rupiah)	Realisasi	Tahun 2023			
			Keu. (%)		Fis. (%)	
			Renc.	Real.	Renc.	Real.
Supervisi Atas Implementasi Aspek Pembiayaan pada Proyek Infrastruktur KPBU Sektor Jalan Non Tol	240,000	233,020	100.00%	97.09%	100.00%	98.00%
Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan						
Layanan Dukungan Manajemen Internal						
Layanan Perkantoran						
Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPIJJ	1,000,000	990,588	100.00%	99.06%	100.00%	100.00%

Sumber: e-monitoring Kementerian PUPR



Gambar IV-2 Kurva S Direktorat PPIJJ TA 2023

Pelaksanaan monitoring kinerja realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PPIJJ Tahun 2023 melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan proyek atau program. Proses ini mencakup analisis data, perbandingan dengan target yang telah ditetapkan, dan identifikasi potensi perbaikan. Berikut disajikan tabel informasi target, realisasi, dan kinerja pada indikator kinerja kegiatan TA 2023:

**Tabel IV.13 Target, Realisasi, dan Kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan
Direktorat PPIJJ TA 2023**

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan													
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Target	0.25%	0.81%	1.24%	1.79%	2.23%	2.46%	3.36%	16.64%	17.27%	17.79%	18.83%	25%
	Realisasi	0.00%	0.86%	1.67%	1.30%	1.75%	1.96%	2.52%	17.80%	19.08%	19.49%	19.76%	25%
	Kinerja	0.00%	106.17%	134.68%	72.63%	78.48%	79.67%	75.00%	106.97%	110.48%	109.56%	104.94%	100%

IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

1. Keterangan

Realisasi capaian indikator kinerja Tahun 2023, capaian IKK Direktorat PPIJJ adalah sebesar 25% dengan nilai kinerja pencapaian IKK adalah 100%, dimana artinya Direktorat PPIJJ mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Isu/Permasalahan

Mengacu pada Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2023, Direktorat PPIJJ melaksanakan 17 (tujuh belas) paket kegiatan selama Tahun Anggaran 2023 yang mendukung kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Namun, terdapat perbedaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat PPIJJ berdasarkan target DIPA 2023 jika dibandingkan dengan target yang tertuang pada Renstra Tahun 2020-2024.

3. Tindak Lanjut

Direktorat PPIJJ akan terus melakukan koordinasi dengan seluruh *stakeholder* terkait, sebagai upaya untuk melakukan percepatan terhadap penyiapan proyek KPBU sektor jalan dan jembatan serta mengejar kemunduran *timeline* pada beberapa proyek sebelumnya.

4.4.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sepanjang tahun 2023, Direktorat PPIJJ mengupayakan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja melalui:

1. Melakukan efisiensi anggaran kegiatan terhadap paket kegiatan yang belum optimal dengan mengalihkan anggaran tersebut pada kegiatan yang lebih membutuhkan dan urgen.
2. Penambahan paket kegiatan baru yang sebelumnya tidak dianggarkan seperti Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyusutan (SMAP) melalui KRO Kemitraan karena Direktorat PPIJJ ditunjuk sebagai *pilot project* pelaksanaan SMAP di DJPI,

Penyusunan Dokumen Rekomendasi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan Tol melalui KRO NSPK, dan Penyusunan Dokumen Pendukung FBC Proyek KPBU Jalan Tol Demak-Tuban dan Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta melalui KRO Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana.

3. Melakukan pengurangan alokasi anggaran pada DIPA TA 2023 (*drop loan*) terhadap paket kegiatan *Toll Roads and Bridges Final Business Case and Bidding Documents Development* yang didanai oleh *loan* ESP ADB dikarenakan kontrak yang telah berakhir dan adanya sisa dana yang tidak terserap sebesar Rp 9.325.065.797,-.
4. Efisiensi pelaksanaan rapat dilakukan oleh Direktorat PPIJJ dengan melaksanakan kegiatan rapat melalui aplikasi seperti *Zoom*, *Google Meet*, *Microsoft Team*, dsb,
5. Penggunaan kertas bekas untuk mencetak konsep-konsep laporan dan konsep surat. Disamping itu, penggunaan aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) secara optimal memudahkan pimpinan dalam memberikan disposisi sehingga dapat mengurangi penggunaan ATK.

4.5 Penghargaan Atas Kinerja

Melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor: 37/KPTS/Dp/2023, Direktorat PPIJJ ditetapkan sebagai *pilot project* penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Direktorat PPIJJ telah resmi tersertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada tanggal 29 November 2023. Penghargaan ini membuktikan bahwa Direktorat PPIJJ mampu menjalankan tugas sebagai *pilot project* penerapan SNI ISO 37001:2016 SMAP di lingkungan DJPI dan diharapkan dapat menjadi pelopor bagi unit kerja lain agar mampu mengimplementasikan penerapan SMAP di lingkungan DJPI. Selain itu, dengan tersertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP ini, membuktikan bahwa seluruh pegawai Direktorat PPIJJ mampu berkomitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi.

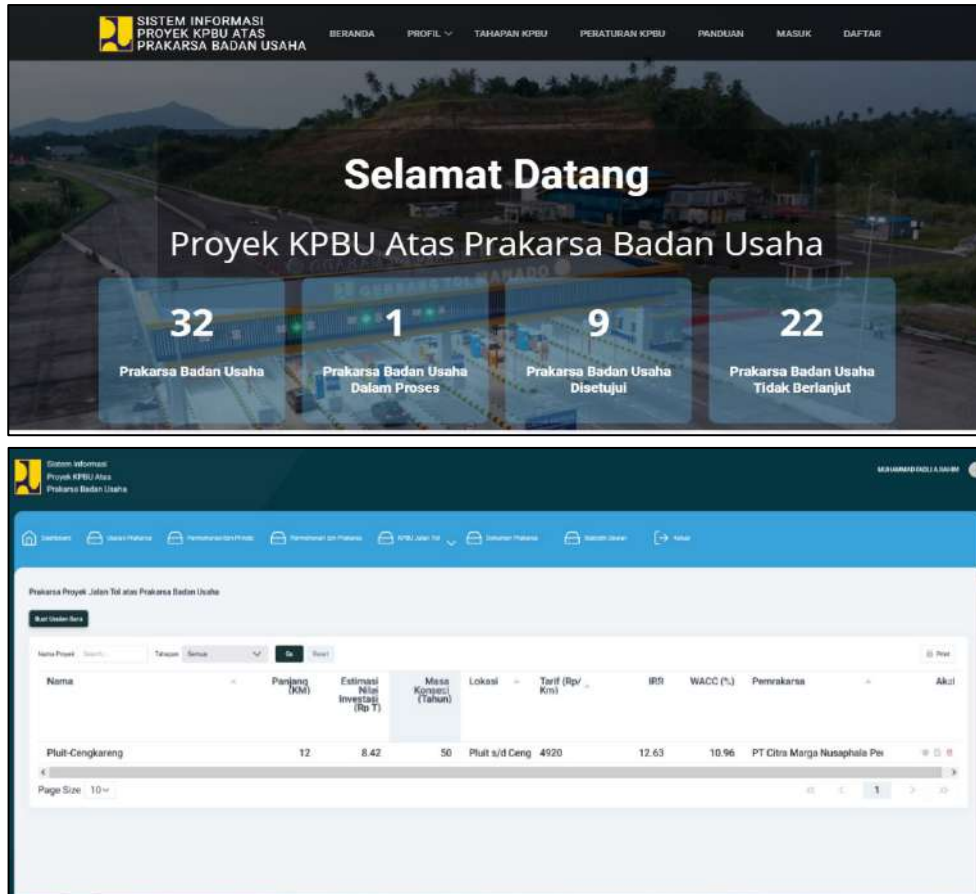


Gambar IV-3 Penyerahan Sertifikat SNI ISO 37001:2016 SMAP

4.6 Inovasi

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan meluncurkan 2 (dua) sistem/inovasi pembiayaan infrastruktur baru, yaitu Sistem Informasi Proyek KPBUs Atas Prakarsa Badan Usaha (SIPRABU) dan Sistem Informasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksanaan Proyek KPBUs (SIPADU) pada Tahun 2022.

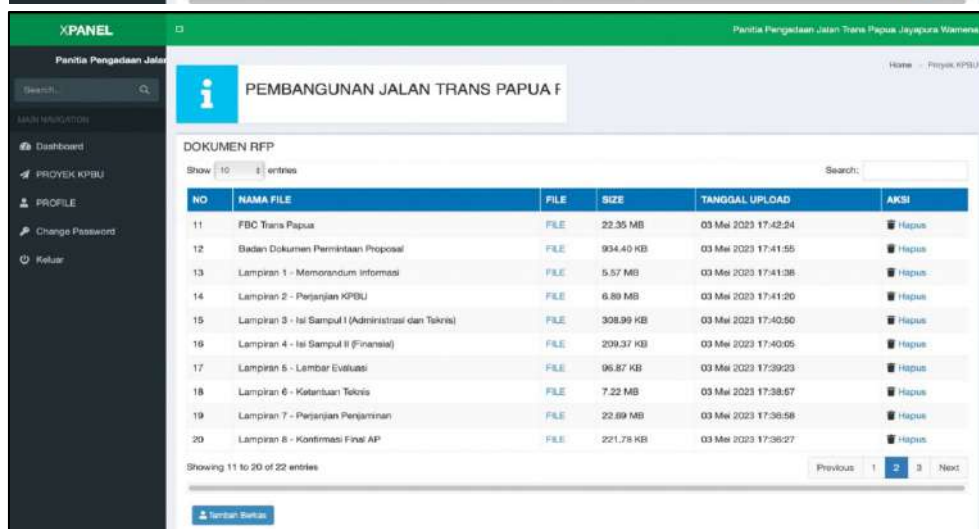
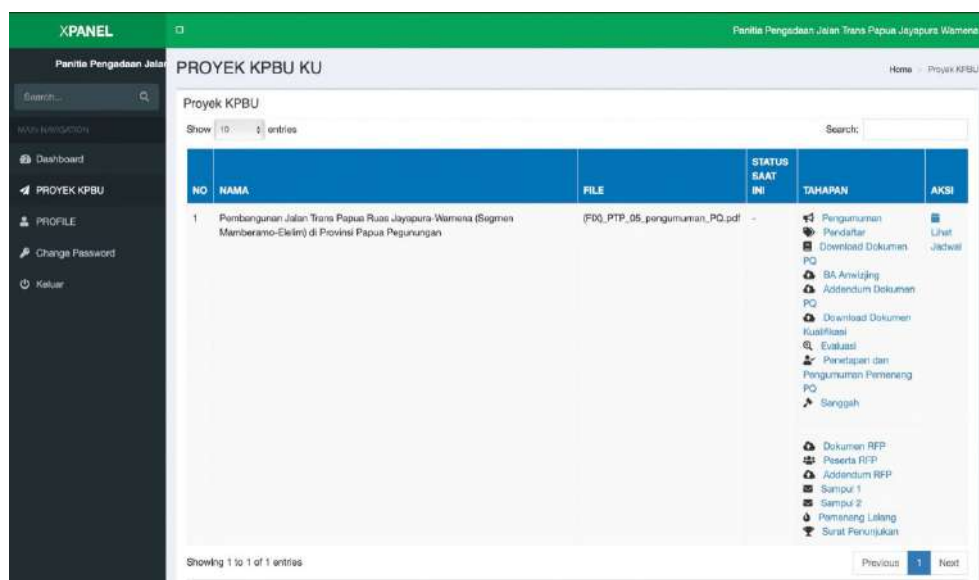
SIPRABU adalah inovasi untuk memudahkan setiap badan usaha dalam melakukan pengusulan proyek KPBUs secara transparan dan kredibel. Layanan ini bisa diakses melalui tautan <https://siprabu.pu.go.id/>. Sepanjang tahun 2023, aplikasi SIPRABU telah diimplementasikan pada Proyek Jalan Tol Pluit-Bandara (bagian dari Jalan Tol Tomang-Pluit-Bandara (Elevated)). Saat ini, proyek tersebut sedang dalam proses Izin Prinsip.



Gambar IV-4 Aplikasi SIPRABU

SIPADU adalah inovasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBu bidang PUPR serta meningkatkan kualitas pengadaan. Adapun SIPADU dikembangkan dengan mengacu kepada Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015 dan Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018. SIPADU dapat diakses melalui tautan <https://pembiayaan.pu.go.id/sipadu/>. Aplikasi ini telah diimplementasikan pada Proyek Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena (Segmen Mamberamo-Elelim) di Provinsi Papua Pegunungan.

Tahap Prakualifikasi (PQ) Proyek Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena (Segmen Mamberamo-Elelim) di Provinsi Papua Pegunungan telah diumumkan pada tanggal 1 Desember 2022, dimana untuk pengumuman hasil Prakualifikasi telah dilakukan pada tanggal 26 Januari 2023. Selanjutnya untuk tahapan RFP dilakukan mulai bulan April sampai dengan November Tahun 2023, dan saat ini Proyek Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena (Segmen Mamberamo-Elelim) sedang dalam proses pengajuan permohonan Penetapan Pemenang Lelang ke Menteri PUPR.



Gambar IV-5 Aplikasi SIPADU



BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan Umum

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk penyampaian informasi atas pelaksanaan kinerja Direktorat PPIJJ selama Tahun 2023, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi Eselon II (Unit Kerja). Diharapkan dari penyusunan Laporan Kinerja ini, dapat dijadikan acuan atau inputan untuk mempermudah perbaikan permasalahan yang terjadi dan dapat menjadi langkah percepatan yang harus dilakukan terkait pencapaian kinerja Direktorat PPIJJ.

Penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2023 pertama pada tanggal 30 November 2022 dengan pagu anggaran sebanyak Rp 12.500.000.000,-. Selama tahun 2023, DIPA telah mengalami 9 (sembilan) kali perubahan. Selain itu, dilakukan juga revisi terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sebanyak 2 (dua) kali perubahan.

Berdasarkan revisi DIPA terakhir, secara keseluruhan anggaran Direktorat PPIJJ tahun 2023 adalah sebesar Rp 32.585.069.000,- dengan realisasi penyerapan keuangan berdasarkan *Integrated e-Monitoring* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat status 8 Januari 2024 adalah sebesar Rp 32.200.700.000,- atau dengan persentase capaian keuangan sebesar 98,82% dari target rencana 100%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 99% dengan target rencana yaitu 100%.

Capaian Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK): Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan telah terealisasi 100% yang setara dengan 25% sehingga nilai capaian kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2023 adalah sebesar 25% dimana artinya Direktorat PPIJJ mampu mencapai target yang telah ditetapkan.



Gambar V-1 Foto Udara Trayek Jalan Tol Trans Papua

5.2 Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan Direktorat PPIJJ dalam mencapai target capaian kinerja dipengaruhi beberapa faktor pendukung, diantaranya keterlibatan pimpinan dalam mengupayakan peningkatan capaian kinerja, pembagian tugas dan fungsi yang seimbang bagi seluruh pegawai, melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, serta dukungan dan kerjasama dari Instansi/Unit Organisasi/Unit Kerja lain dalam melakukan percepatan penyiapan proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.

Keberhasilan Direktorat PPIJJ tersertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) karena didukung kinerja yang baik oleh Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (Tim FKAP) serta seluruh pegawai Direktorat PPIJJ yang komitmen untuk melaksanakan kegiatan SMAP.

5.3 Permasalahan

Dalam upaya mencapai capaian kinerja yang telah ditetapkan, terdapat beberapa kendala yang muncul dan mempengaruhi proses kinerja di Direktorat PPIJJ, antara lain:

1. Terdapat beberapa proses penyiapan proyek KPBU sektor jalan dan jembatan yang mundur dari *timeline* yang telah dtargetkan dikarenakan sulitnya mencapai kesepakatan antar pemangku kepentingan;
2. Adanya proyek jalan tol yang mengalami pengakhiran Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) seperti Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi dan Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap karena adanya cedera janji dari Badan Usaha serta tidak dapat memenuhi tahapan *financial close*, sehingga mengakibatkan adanya perubahan lingkup proyek dan akan dilaksanakan proses lelang ulang;
3. Terbatasnya kemampuan kapasitas fiskal untuk proyek KPBU sektor jalan dan jembatan yang menggunakan skema *Availability Payment* (AP)/Ketersediaan Layanan;
4. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan Barang Milik Negara (BMN) yang memadai untuk mendukung beban kerja dan kegiatan yang dilaksanakan.

5.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

5.4.1 Rekomendasi

Agar dapat mencapai target kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya, rekomendasi yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2024 antara lain:

1. Percepatan penyelesaian masalah dan isu terhadap proyek KPBU sektor jalan dan jembatan sesuai rencana target yang telah ditentukan;

2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang meliputi review, pemantauan, evaluasi atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran belanja Direktorat PPIJJ sehingga sesuai dengan agenda yang telah disusun;
3. Pengusulan Sumber Daya Manusia dan pengadaan BMN baru untuk meningkatkan kinerja Direktorat dengan memperhatikan beban kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
4. Mengimplementasikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam seluruh kegiatan/pekerjaan di Direktorat PPIJJ sebagai kelanjutan dalam mempertahankan sertifikat SNI ISO 37001:2016, serta sebagai bentuk komitmen seluruh pegawai dalam mencegah tindak pidana korupsi.

5.4.2 Tindak Lanjut

Isu strategis yang perlu ditindaklanjuti di tahun 2024, sebagai berikut:

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan;
2. Pelaksanaan Harmonisasi RPerpres Perubahan Ketiga Nomor 100 Tahun 2014;
3. Evaluasi terkait perubahan lingkup Jalan Tol Kayuagung - Palembang – Betung;
4. Melakukan finalisasi terkait dokumen kelengkapan data dukung Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL);
5. Penyiapan Dokumen AMDAL dan ANDALALIN serta reviu FBC Proyek Jalan Tol Malang – Kepanjen;
6. Kelanjutan proses persetujuan lingkungan dan proses permohonan KKPR proyek Jalan Tol Demak-Tuban, Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta dan Jalan Tol Tuban-Babat-Lamongan-Gresik, serta penyiapan lelang Jalan Tol Tuban-Babat-Lamongan-Gresik;
7. Penetapan pemenang lelang oleh Menteri PUPR Proyek KPBU AP Jalan Trans Papua Ruas Jayapura – Wamena (Segmen Mamberamo – Elelim);
8. Pemutakhiran Dokumen Studi Kelayakan O&M Jembatan Suramadu *bundling* dengan *Surabaya Eastern Ring Road*;
9. Pemutakhiran Dokumen Studi Kelayakan Proyek Jembatan Batam-Bintan;
10. Penyiapan proses lelang ulang Proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis dan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi;
11. Penyusunan FBC dan *Readiness Criteria* melalui hibah KIAT untuk Proyek Jalan Tol Pejagan-Cilacap;
12. Finalisasi dokumen Pra Studi Kelayakan dengan memasukkan perubahan ruang lingkup pada 58 ruas Jalan Akses Exit Tol;
13. Persiapan Pelelangan Proyek KPBU Fly Over Sitinjau Lauik;

14. Kelanjutan proses penyiapan usulan prakarsa Jalan Tol Cilegon-Anyer, Jalan Tol Pluit-Bandara (Bagian dari Jalan Tol Tomang-Pluit-Bandara (*Elevated*)), dan Jalan Tol Caringin-Cisarua (bagian dari Jalan Tol Caringin-Cianjur);
15. Pelaksanaan Uji Publik Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Badan Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Jalan dan Jembatan (Jalan Tol Lingkar Selatan Bandung).



LAMPIRAN

LAMPIRAN I

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Reni Ahiantini**

Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Pihak Pertama

RENI AHANTINI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan</i>	25%

KEGIATAN

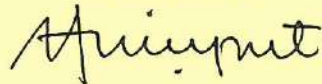
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

ANGGARAN

Rp12.500.000.000,00

JAKARTA, JANUARI 2023

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
JALAN DAN JEMBATAN**



RENI AHANTINI



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Reni Ahiantini**

Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2023

Pihak Kedua

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Pihak Pertama

RENI AHIANITINI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

REVISI

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET	
(1)		(2)	
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif			
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan		25%	
ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	Rekomendasi Kebijakan
ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4	Rekomendasi Kebijakan
ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4	Layanan
AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2	Kesepakatan
AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2	NSPK
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5	Dokumen
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan

KEGIATAN

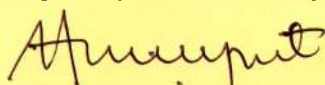
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

ANGGARAN

Rp40.899.202.000,00

JAKARTA, OKTOBER 2023

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN**



RENI AHANTINI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Reni Ahiantini**

Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Desember 2023

Pihak Kedua

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Pihak Pertama

RENI AHANTINI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

REVISI

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET	
(1)		(2)	
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif			
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan		25%	
ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	Rekomendasi Kebijakan
ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	5	Rekomendasi Kebijakan
ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	Rekomendasi Kebijakan
AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2	Kesepakatan
AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2	NSPK
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5	Dokumen
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan

KEGIATAN

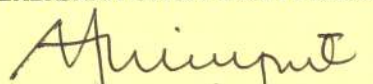
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

ANGGARAN

Rp32.585.069.000,00

JAKARTA, 27 DESEMBER 2023

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**


HERRY TRISAPUTRA ZUNA

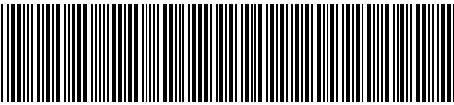
**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN**


RENI AHIANITINI

LAMPIRAN II

DIPA REVISI KE-9





**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2023**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

Revisi ke 09
Tanggal : 22 Desember 2023

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- 2. Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- Sebesar : Rp. 243.192.037.000 (DUA RATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR SERATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA TIGA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir
Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	214.891.391.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	28.300.646.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	28.300.646.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	214.891.391.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	28.300.646.000
-------------------	-----------	-----------------	-----------------------------------	-----------	----------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

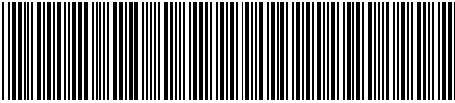
ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023



DS:4230-3078-8985-8520

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	157.988.004.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	157.988.004.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	85.204.033.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	85.204.033.000

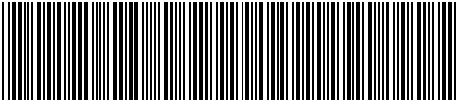
LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023



Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	85.204.033.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	85.204.033.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	157.988.004.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	73.396.881.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	19.398.894.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	65.192.229.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
I A. INFORMASI KINERJA



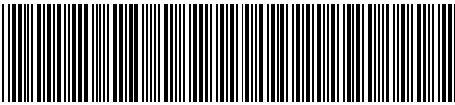
DS:4230-3078-8985-8520

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				85.204.033.000	
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan				85.204.033.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.822.000.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan		5,00	Rekomendasi Kebijakan	7.822.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		3,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	2.190.000.000
Rincian Output	:	01	AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan		3,00	NSPK	2.190.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4976.BEB	Bantuan Keluarga		13.993,00	Keluarga, KK	55.972.000.000
Rincian Output	:	01	BEB.001	Bantuan Biaya Administrasi		13993.00	Keluarga	55.972.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		30,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.720.000.000
Rincian Output	:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		30,00	Dokumen	6.720.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4976.PEA	Koordinasi		1,00	kegiatan	3.000.033.000
Rincian Output	:	01	PEA.001	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan (PN)		1,00	kegiatan	3.000.033.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya		2,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	9.500.000.000
Rincian Output	:	01	QAH.001	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)		1,00	layanan	4.500.000.000
			02	QAH.002 Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)		1,00	layanan	5.000.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
I A. INFORMASI KINERJA

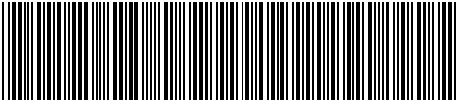


DS:4230-3078-8985-8520

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Pelayanan Publik Lainnya				layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	
Program	:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen		157.988.004.000
Kegiatan	:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		73.396.881.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4194.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit 66.871.835.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan 665.826.000
		02	EBA.957 Layanan Hukum	1.00	Layanan 750.056.000
		03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	1.00	Layanan 1.982.810.000
		04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan 800.000.000
		05	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan 975.000.000
		06	EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan 367.134.000
		07	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan 61.331.009.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4194.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4,00	Unit, m2, Paket 2.842.198.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	2.00	Unit 832.594.000
		02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2.00	Unit 2.009.604.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EBC Layanan Manajemen SDM Internal	260,00	Orang, Layanan, Rekomendasi 1.015.000.000
Rincian Output	:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	260.00	Orang 1.015.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
I A. INFORMASI KINERJA



DS:4230-3078-8985-8520

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	9,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.667.848.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.00	Dokumen	1.457.852.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.00	Dokumen	735.000.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	2.00	Dokumen	474.996.000
Kegiatan		:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			19.398.894.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:					
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	12,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	15.428.894.000
Rincian Output		:	01	ABF.002 Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10.00	Rekomendasi Kebijakan	14.173.170.000
		:	02	ABF.003 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.255.724.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.000.000.000
Rincian Output		:	01	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	4.00	Layanan	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1.970.000.000
Rincian Output		:	01	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.00	Dokumen	728.944.000
		:	02	EBD.965 Layanan Audit Internal	3.00	Dokumen	1.241.056.000
Kegiatan		:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			65.192.229.000
		:					

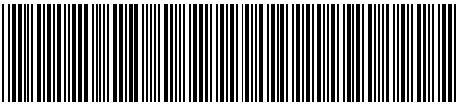
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	8	:	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	25,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	43.662.627.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.650.000.000
		02	ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.750.000.000
		03	ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2,00	Rekomendasi Kebijakan	2.640.000.000
		04	ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
		05	ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	570.000.000
		06	ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	5,00	Rekomendasi Kebijakan	23.405.270.000
		07	ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.680.000.000
		08	ABF.009	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3,00	Rekomendasi Kebijakan	2.485.000.000
		09	ABF.012	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	5,00	Rekomendasi Kebijakan	3.265.000.000
		10	ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
		11	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	2.467.357.000
		12	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.750.000.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	4197.AEE	Kemitraan	13,00	Kesepakatan	13.359.643.000
Rincian Output	:	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	5,00	Kesepakatan	2.199.643.000
		02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2,00	Kesepakatan	3.250.000.000
		03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2,00	Kesepakatan	2.910.000.000
		04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4,00	Kesepakatan	5.000.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
I A. INFORMASI KINERJA



DS:4230-3078-8985-8520

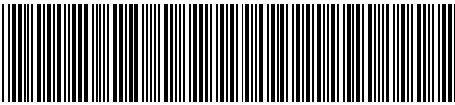
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	10	:	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	4.179.799.000
Rincian Output		:	01	AFA.002 NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00	NSPK	1.479.799.000
		:	02	AFA.003 NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	NSPK	2.200.000.000
		:	03	AFA.004 NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	17,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	3.990.160.000
Rincian Output		:	01	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	17.00	Dokumen	3.990.160.000

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023



DS:4230-3078-8985-8520

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	243.192.037.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	1.938.401	Rp.	28.300.646.000
1. Rupiah Murni	Rp.	214.891.391.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	28.300.646.000		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	ASIANDVELOPMENTB 3455-INO 1F1NDHGA	USD USD IDR	1.912,21 28.300.646,00	2	28.300.646			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	32.701.169	207.648.670	2.842.198	-	-	243.192.037	01 . 54	
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	85.204.033	-	-	-	85.204.033		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	-	85.204.033	-	-	-	85.204.033		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.822.000	-	-	-	7.822.000		
01	RM	-	7.822.000	-	-	-	7.822.000		
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.190.000	-	-	-	2.190.000		
01	RM	-	2.190.000	-	-	-	2.190.000		
4976.BEB	Bantuan Keluarga (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	55.972.000	-	-	-	55.972.000		
01	RM	-	55.972.000	-	-	-	55.972.000		
4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	6.720.000	-	-	-	6.720.000	139@	01 . 54

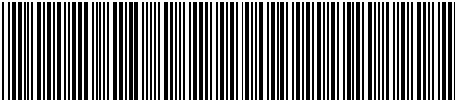
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM 4976.PEA	RM	-	6.720.000	-	-	-	6.720.000	139	
	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	3.000.033	-	-	-	3.000.033	01 . 54	
01 RM 4976.QAH	RM	-	3.000.033	-	-	-	3.000.033	139	
	Pelayanan Publik Lainnya (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	9.500.000	-	-	-	9.500.000	01 . 54	
01 RM 033.16.WA	RM	-	9.500.000	-	-	-	9.500.000	139	
	Program Dukungan Manajemen	32.701.169	122.444.637	2.842.198	-	-	157.988.004		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	32.701.169	37.853.514	2.842.198	-	-	73.396.881		
4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	32.701.169	34.170.666	-	-	-	66.871.835	01 . 54	
01 RM		32.701.169	34.170.666	-	-	-	66.871.835	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:4230-3078-8985-8520

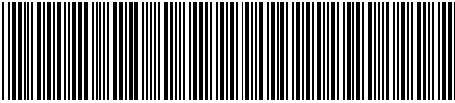
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	2.842.198	-	-	2.842.198	01 . 54	
01 RM		-	-	2.842.198	-	-	2.842.198	139	
4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.015.000	-	-	-	1.015.000	01 . 54	
01 RM		-	1.015.000	-	-	-	1.015.000	139	
4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.667.848	-	-	-	2.667.848	01 . 54	
01 RM		-	2.667.848	-	-	-	2.667.848	139	
4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	-	19.398.894	-	-	-	19.398.894		
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	15.428.894	-	-	-	15.428.894	01 . 54	
01 RM		-	6.894.773	-	-	-	6.894.773	139	
02 PLN		-	8.534.121	-	-	-	8.534.121	140	

PL 1F1NDHGA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



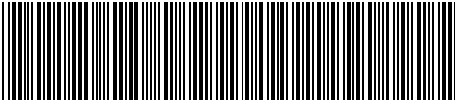
DS:4230-3078-8985-8520

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	01 . 54	PL 1F1NDHGA
01 RM		-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	139	
4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.970.000	-	-	-	1.970.000	01 . 54	
01 RM		-	1.970.000	-	-	-	1.970.000	139	
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	65.192.229	-	-	-	65.192.229		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	43.662.627	-	-	-	43.662.627	01 . 54	
01 RM		-	23.896.102	-	-	-	23.896.102	139	
02 PLN		-	19.766.525	-	-	-	19.766.525	140	
4197.AEE	Kemitraan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	13.359.643	-	-	-	13.359.643	01 . 54	PL 1F1NDHGA
01 RM		-	13.359.643	-	-	-	13.359.643	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:4230-3078-8985-8520

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	4.179.799	-	-	-	4.179.799	01 . 54	
01 RM		-	4.179.799	-	-	-	4.179.799	139	
4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	3.990.160	-	-	-	3.990.160	01 . 54	
01 RM		-	3.990.160	-	-	-	3.990.160	139	
JUMLAH		32.701.169	207.648.670	2.842.198	-	-	243.192.037		

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DS:4230-3078-8985-8520

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:4230-3078-8985-8520

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

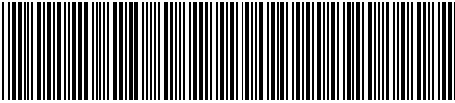
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	347.654	1.527.904	2.468.319	3.111.386	3.357.535	2.406.990	3.078.402	24.719.624	2.507.316	5.720.323	6.976.152	8.970.624	65.192.229

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
IV A. B L O K I R



DS:4230-3078-8985-8520

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

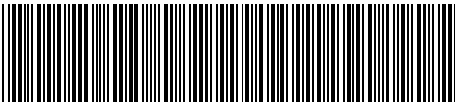
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 3.458.644		
	52 Belanja Barang Rp. 3.458.644		
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan		
4976.BEB	Bantuan Keluarga		
	526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.458.644		
	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
IV B. C A T A T A N



DS:4230-3078-8985-8520

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

LAMPIRAN III

PENGUKURAN KINERJA



Pengukuran Kinerja

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKK	Janis Indikator	KRO (Kode RO)	RO	Satuan	Target Renstra	Target DIPA Rev9	Target PK (%)	Bobot RO (%)	Realisasi Capaian RO	Realisasi Capaian RO (%)	Total Capaian PK (%)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya											
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan											
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan paket pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan (50%)	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (ABF)	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	25%	5%	1	5%	25%
			Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	-		-	-	-	
			Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	3	5		30%	5	30%	
			Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	1		10%	1	10%	
	Tingkat implementasi kegiatan transaksi paket pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan (50%)	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (AFA)	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NSPK	1	2		10%	2	10%	
		Kemitraan (AEE)	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	12	2		25%	2	25%	
		Layanan Manajemen Kinerja Internal (EBD)	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	4	5		20%	5	20%	

LAMPIRAN IV

BERITA ACARA KESEPAKATAN CAPAIAN KINERJA





BERITA ACARA KESEPAKATAN

NOMOR : 02 / BA / DP / 2024

Pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 bertempat di Hotel 101 Darmawangsa Jakarta telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Berita Acara Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2023 yang dihadiri oleh perwakilan dari Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Rapat ini bertujuan untuk menyepakati Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2023 dengan hasil sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2023

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
SP: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman			
IKSP: Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100,00	235,57	235,57
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
SS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSS. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan Efisien dan Efektif	100,00	116,75	116,75
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif	100,00	98,95	98,95
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	87,81	99,37	113,16

2. Capaian Kinerja pada Unit Kerja Eselon II di lingkungan DJPI TA. 2023

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	16,13	107,53
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00	100,00
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	10,00	100,00
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	15,00	150,00
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	18,75	125,00
6	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10,00	10,00	100,00

b. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	100,00	109,86	109,86

c. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	25,00	22,91	91,64

d. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25,00	25,00	100,00

e. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	25,00	24,80	99,20

f. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25,00	24,56	98,24
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100,00	106,07	106,07

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2023. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 Januari 2024

Yang Menyepakati,

Sekretaris Direktorat Jenderal



Sudiro Roi Santoso

Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan



Agus Sulaeman

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air



Arvi Argyantoro

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan



Reni Ahiantini

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman



Meike Kencanawulan Martawidjaja

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan



Haryo Bakti Martoyoedo

Mengetahui,
Direktur Jenderal



Herry Trisaputra Zuna

Lampiran Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI TA. 2023

Nomor :

Tanggal : 18 Januari 2024

A. Capaian Kinerja Bantuan Pembiayaan Perumahan TA. 2023

Status: 31 Desember 2023

NO	BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET UNIT	REALISASI	
				KEUANGAN (Rp)	UNIT
1	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	25.180.000.000.000	220.000	26.320.045.507.031	229.000
2	Subsidi Selisih Bunga (SSB)*	3.457.520.000.000	754.004	3.457.520.000.000	750.497
3	Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)**	895.000.000.000	220.000	895.000.000.000	220.000
4	SMF	-	10.000	6.493.872.078.412	333.988
5	TAPERA	1.050.000.000.000	12.072	1.042.845.955.685	7.249
TOTAL		30.582.520.000.000	242.072	38.209.283.541.128	570.237

Keterangan:

Target unit berdasarkan Renstra DJPI TA. 2020-2024 dan penyesuaian target Tapera sesuai Pengesahan atas RKAT BP Tapera Tahun 2023

*) Anggaran SSB digunakan untuk pembayaran penerbitan KPR tahun 2015-2020 sebanyak 754.004 unit, tidak ada akad baru sejak 2021, dan realisasi unit tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja

**) Realisasi unit SBUM tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja

B. Capaian Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Bobot 30%)

Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Hasil Survei (%)	Target (%)	Capaian (%)
	96,42	30,00	28,93

C. Capaian Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Bobot 30%)

Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Hasil Survei (%)	Target (%)	Capaian (%)
	96,50	30,00	28,95

D. Capaian Kinerja Paket Pembiayaan KPBU Siap Dikerjasamakan TA. 2023

NO	SEKTOR	TARGET		REALISASI			
		JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI (Rp)	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI (Rp)	
1	Sumber Daya Air	5	5.141.240.929.000	2	PLTM Bendungan Jenelata, Sulawesi Selatan	134.219.000.000	359.599.000.000
					PLTM Leuwikeris, Jawa Barat	225.380.000.000	
2	Jalan dan Jembatan	2	66.432.251.000.000	5	Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Ciamis	37.147.000.000.000	135.750.000.000.000
					Jalan Tol Tuban - Babat - Lamongan-Gresik	23.332.000.000.000	
					Jalan Tol Demak Tuban	49.607.000.000.000	
					Jalan Tol Gilimanuk Mengwi	22.840.000.000.000	
					Fly Over Sitinjau Lauik	2.824.000.000.000	
3	Permukiman	2	10.620.000.000.000	4	SPAM Regional Karian Serpong Sisi Hilir Kota Tangerang (BtoB)	1.940.000.000.000	27.179.725.000.000
					SPAM Batam-Bintan	14.438.858.000.000	
					SPAM Regional Ir. H.Djuanda/ Jatiluhur II	9.740.000.000.000	
					SPAM Regional Sinumbra	1.060.867.000.000	
4	Perumahan	4	61.230.000.000.000	2	Rusun Hankam WP 1A (60 tower)	14.990.000.000.000	16.660.000.000.000
					Rusun North Government WP 1A (6 tower)	1.670.000.000.000	
TOTAL		13	143.423.491.929.000	13	179.949.324.000.000		
Capaian Proyek Siap Dikerjasamakan (70%)				70,00%			
Capaian Investasi Proyek Siap Dikerjasamakan (70%)				87,83%			

Keterangan:

- Target berdasarkan DIPA DJPI TA. 2023
- Realisasi Proyek Siap Dikerjasamakan minimal menyelesaikan tahapan Penyiapan (FBC/FS)

E. Capaian Realisasi Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	KEUANGAN (%)		FISIK (%)		
					RN	RL	RN	RL	KINERJA
I	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	85.204.033	78.534.648	100,00	92,17	100,00	92,42	92,42
1	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	85.204.033	78.534.648	100,00	92,17	100,00	92,42	92,42
II	WA	Program Dukungan Manajemen	157.988.004	155.816.386	100,00	98,63	100,00	98,86	98,86
1	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	73.396.881	72.536.007	100,00	98,83	100,00	99,10	99,10
2	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	19.398.894	19.191.105	100,00	98,93	100,00	99,79	99,79
3	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	65.192.229	64.089.275	100,00	98,31	100,00	98,32	98,32
TOTAL			243.192.037	234.351.034	100,00	96,36	100,00	96,60	96,60

Sumber: <https://iemon.pu.go.id/>, status: 10 Januari 2024



**BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 2022**

Pada hari Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-05-2023) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini,

1. Nama : Desy Nina Wulandari
Jabatan Pada : Supervisor
Tim Evaluator
NIP : 197712092005022001
Unit Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan
2. Nama : Rahmawati Waluyaningsih
Jabatan Pada : Ketua
Tim Evaluator
NIP : 198509162009012001
Unit Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan

bertindak sebagai perwakilan Evaluator Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sesuai dengan Surat Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor: 36.1/SPT/Ps/2023 tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama : Rika Andriani
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
NIP : 197407022009012001
Unit Kerja : Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
2. Nama : Rifki Maudianda
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pertama
NIP : 199309012020121003
Unit Kerja : Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

bertindak sebagai perwakilan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan atau Evaluatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berikut adalah hasil kesepakatan antara Evaluator dan Evaluatan, sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan pembahasan Evaluasi Implementasi AKIP Tahun 2022 dengan uraian sebagaimana tertuang dalam lampiran berita acara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara.
2. PIHAK KEDUA sepakat melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi dari PIHAK PERTAMA dalam rangka peningkatan kinerja akuntabilitas kinerja dimasa yang akan datang.
3. PIHAK PERTAMA akan melakukan pemantauan terhadap perbaikan atau perubahan manajemen kinerja yang masih perlu dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA/EVALUATOR



Desy Nina
Wulandari



Rahmawati
Waluyaningsih

PIHAK KEDUA/EVALUATAN



Rika Andriani



Rifki Maudianda

LAMPIRAN BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 2022

No.	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan	Rekomendasi Evaluator	Tanggapan Evaluatan	Kesepakatan
1.	Perencanaan Kinerja				
a.	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	Pada kriteria "Terpenuhi dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir" Direktorat PPIJJ tidak dapat terpenuhi dikarenakan Dokumen Perencanaan Kinerja belum mencapai 5 tahun (DJPI-PPIJJ terbentuk tahun 2019 (sebelum tahun 2019 memiliki TUSI berbeda))	-	-	
b.	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	Dokumen perencanaan kinerja Direktorat PPIJJ belum menjadi percontohan nasional sehingga penilaian untuk komponen yang bersifat Inovatif dan Percontohan Nasional belum dapat terpenuhi	Menyusun perencanaan yang inovatif terkait persiapan dan pelaksanaan KPBU		Sepakat
c.	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Monev Kinerja Bulanan Direktorat PPIJJ telah disusun secara berkala dan diupload pada E-sakip namun belum menyajikan pantauan terhadap rencana aksi dengan indikator yang ada di PK (Perjanjian Kinerja) - Dokumen perencanaan kinerja Direktorat PPIJJ belum menjadi percontohan nasional sehingga penilaian untuk komponen yang bersifat Inovatif dan Percontohan Nasional belum dapat terpenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen laporan kinerja dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebaiknya dimanfaatkan sebagai masukan dan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan di tahun selanjutnya Menyajikan capaian kinerja terhadap target yang ada di Perjanjian Kinerja secara berkala pada Laporan Monev Kinerja Bulanan 		
2.	Pengukuran Kinerja				
a.	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> Pada kriteria "Terpenuhi dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir" Direktorat PPIJJ tidak terpenuhi dikarenakan belum mencapai 5 	-	-	

No.	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan	Rekomendasi Evaluator	Tanggapan Evaluatan	Kesepakatan
		tahun (DJPI-PPIJJ terbentuk tahun 2019 (TUSI berbeda))			
b.	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Dalam Laporan Monev Bulanan Direktorat PPIJJ belum menyampaikan capaian kinerja sesuai target yang ada di PK Belum ada komponen yang bersifat Inovatif dan percontohan nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Menambahkan dan menyajikan capaian kinerja terhadap target yang ada di Perjanjian Kinerja secara berkala pada Laporan Monev Kinerja Bulanan Menyampaikan kendala dan tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian kinerja ke dalam Laporan Monev Bulanan secara spesifik 		Sepakat
c.	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> Tunjangan kinerja/ penghasilan belum berdasarkan pengukuran kinerja, masih berdasarkan kehadiran/presensi Belum ada inovasi dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong BPSDM untuk menyusun peraturan terkait pemberian tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja; Pemberian kesempatan berkembang/berkreasi kepada pegawai berprestasi sebagai bentuk reward 		Sepakat
3. Pelaporan Kinerja					
a.	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian pada e-sakip mengalami keterlambatan Pengesahan pada laporan kinerja maupun laporan bulanan tidak menyertakan tanggal (hanya bulan dan tahun) Tidak terpenuhinya kriteria "Terpenuhi dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir" dikarenakan Direktorat PPIJJ belum mencapai 5 tahun (DJPI-PPIJJ terbentuk tahun 2019 (TUSI berbeda)) 	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan penyampaian laporan pada e-sakip tepat waktu (menghindari keterlambatan upload) Memastikan untuk menyampaikan dan mencantumkan tanggal pengesahan laporan untuk tidak terlambat atau melebihi batas waktu yang ditetapkan pada Permen PUPR No. 9 Tahun 2018 		Sepakat
b.	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan nya	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja belum mencantumkan analisis dan evaluasi dengan level nasional Penyampaian Kendala pada Laporan Kinerja kurang Spesifik 	<p>Melengkapi analisis dan evaluasi terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sandingan capaian tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya Sandingan capaian tahun berjalan terhadap target Renstra (RPJMN) 		Sepakat

No.	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan	Rekomendasi Evaluator	Tanggapan Evaluatan	Kesepakatan
		<ul style="list-style-type: none"> Dalam Laporan Kinerja belum mencantumkan analisis dan evaluasi : <ul style="list-style-type: none"> sandingan capaian tahun berjalan dengan target Renstra 2020-2024 (target total di akhir periode Renstra) sandingan capaian tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sandingan tahun berjalan dengan capaian entitas lainnya yang selevel Laporan Kinerja telah menyampaikan Rekomendasi LHE TA.2021, namun belum ada penjelasan tindak lanjut dari LHE TA.2021 Belum terdapat inovasi dalam Pelaporan Kinerja dan belum menjadi percontohan nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Sandingan capaian tahun berjalan terhadap capaian entitas lainnya yang selevel Menyampaikan tindak lanjut terhadap rekomendasi LHE pada tahun sebelumnya Menyampaikan kendala, permasalahan serta tindak lanjut dari permasalahan didalam Laporan Kinerja secara spesifik 		
c.	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam Penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	<ul style="list-style-type: none"> Analisa untuk 2 tahun terhadap capaian kinerja tidak mengalami kenaikan (stagnan) Belum terdapat inovasi dalam Pelaporan Kinerja dan belum menjadi percontohan nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan daya saing organisasi melalui peningkatan capaian output dan outcome kinerja organisasi 		Sepakat
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
a.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terpenuhinya kriteria "Terpenuhi dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir" dikarenakan Direktorat PPIJJ belum mencapai 5 tahun (DJPI-PPIJJ terbentuk tahun 2019 (TUSI berbeda) 	-		
b.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> LHE dalam esakip masih pada tahap pengembangan namun sudah ada penyampaian hasil penilaian pada esakip Belum terdapat inovasi dalam penerapan akuntabilitas kinerja internal 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong Pusdatin dan Sekjen dalam mengembangkan aplikasi e-sakip 		Sepakat

94

No.	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan	Rekomendasi Evaluator	Tanggapan Evaluatan	Kesepakatan
c.	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Inerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan atas tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP tahun sebelumnya belum terdapat pada Lakin • pada lakin tidak terdapat perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya • Belum terdapat inovatif dalam implementasi SAKIP dan belum menjadi percontohan nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebaiknya menindaklanjuti secara menyeluruh terhadap hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja; • Menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP tahun sebelumnya ke dalam Laporan Kinerja 		

LAMPIRAN V

PENGHARGAAN





Gambar 1

Pedoman Pelaksanaan SMAP Direktorat
PPIJJ



Gambar 2

Sertifikat SNI ISO 37001:2016 SMAP
Direktorat PPIJJ



Gambar 3

Serah Terima Sertifikat SNI ISO 37001:2016 SMAP Direktorat PPIJJ

LAMPIRAN VI

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN

PENANDATANGANAN
PERJANJIAN PENGUSAHAAN JALAN TOL
KAMAL - TELUKNAGA - RAJEG
Jakarta, 1 Agustus 2023





Gambar 1 Market Consultation Proyek Fly Over Sitinjau Lauik Tanggal 5-6 Desember 2023



Gambar 2 Market Consultation Proyek Jalan Tol Gilimanuk Mengwi tanggal 14,15, dan 18 September 2023



Gambar 3 Market Sounding Proyek Fly Over Sitinjau Lauik tanggal 23 November 2023



Gambar 4 Market Sounding Proyek Jalan Tol Gilimanuk Mengwi tanggal 11 September 2023



Gambar 5 Survei Lapangan ke Lokasi Proyek Fly Over Sitinjau Lauik pada bulan April 2023



Gambar 6 Rapat Terkait Penyiapan Proyek Fly Over Sitinjau Lauik pada bulan April 2023



Gambar 7 Rapat Pembahasan Dokumen Studi Kelayakan dan Pemenuhan Kelengkapan Dokumen Konsorsium Jalan Kohod-Lebakwangi



Gambar 8 Survei Lapangan ESG pada tanggal 24 Mei 2023



Gambar 9 Market Sounding Proyek Jalan Tol Tuban-Babat-Lamongan Gresik pada tanggal 7 Maret 2023



Gambar 10 Market Consultation Proyek Jalan Tol Tuban-Babat-Lamongan Gresik pada tanggal 16 Mei 202



Gambar 11 Pelatihan SMAP bagi Pegawai Direktorat PPIJJ pada bulan Juli 2023